

**SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF  
KH HASYIM ASY'ARI TERHADAP PENJAJAH  
BELANDA DAN JEPANG (1905-1947)**



Oleh :

**Imam Ibnu Hajar**  
NIM. 12300016038

**DISERTASI**

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM  
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

## PENGESAHAN

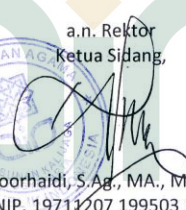
Disertasi berjudul : SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF KH HASYIM ASY'ARI  
TERHADAP PENJAJAH BELANDA DAN JEPANG (1905-1947)

Ditulis oleh : Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.  
N I M : 12300016038  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial islam

**Telah dapat diterima**  
**sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)**  
**dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Sejarah kebudayaan Islam**

Yogyakarta, 28 Juni 2019

a.n. Rektor  
Ketua Sidang,

  
Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

**YUDISIUM**

**BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL **7 JUNI 2018**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **IMAM IBNU HAJAR, S.Ag., M.Ag.** NOMOR INDUK MAHASISWA **12300016038** LAHIR DI **JOMBANG** TANGGAL **6 AGUSTUS 1968**,

**LULUS DENGAN PREDIKAT :**

~~PULJAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN\*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM KONSENTRASI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

**SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 659**

YOGYAKARTA, 28 JUNI 2019

A.N. REKTOR  
KETUA SIDANG,



PROF. NOORHAIDI, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

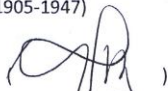
**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.  
N I M : 12300016038

()

Judul Disertasi : SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF KH HASYIM ASY'ARI  
TERHADAP PENJAJAH BELANDA DAN JEPANG (1905-1947)

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D.

()

Sekretaris Sidang : Dr. H. Waryono, M.Ag.

()

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Muh. Abdul Karim, MA., MA.  
(Promotor/Penguji)

()

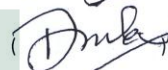
2. Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum.  
(Promotor/Penguji)

()

3. Prof. Dr. H. Machasin, MA.  
(Penguji)

()

4. Prof. Dr. Djoko Suryo  
(Penguji)

()

5. Dr. Hj. Siti Maryam,, M.Ag.  
(Penguji)

()

6. Prof. Dr. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.  
(Penguji)

()

Diujikan di **Yogyakarta** pada hari **Jum'at** tanggal **28 Juni 2019**

Tempat : AULA lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 14.00 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3,47

Predikat Kelulusan : Pujian (Cum laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan



Sekretaris Sidang,

**Dr. H. Waryono, M.Ag.**

NIP. 19701010 199903 1 002



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.  
N I M : 12300016038  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, April 2019

Saya yang menyatakan,



Imam Ibnu Hajar, S. Ag., M.Ag.  
NIM: 09.34.721



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**PASCASARJANA**

## **PENGESAHAN PROMOTOR**

Promotor : Prof. Dr. H.M. Abdul Karim, MA., MA. (  )

Promotor : Dr. Nurul Hak, M.Hum. (  )

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF  
KH HASYIM ASY'ARI TERHADAP PENJAJAH  
BELANDA DAN JEPANG (1905-1947)

yang ditulis oleh:

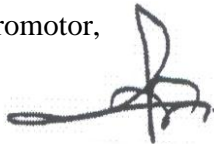
N a m a : Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.  
N I M : 12300016038  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 7 Juni 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 7 Desember 2018

Promotor,



Prof. Dr. H.M. Abdul Karim, MA., MA.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF  
KH HASYIM ASY'ARI TERHADAP PENJAJAH  
BELANDA DAN JEPANG (1905-1947)

yang ditulis oleh:

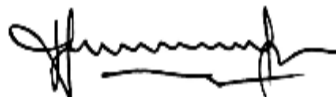
N a m a : Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.  
N I M : 12300016038  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 7 Juni 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 7 Desember 2018

Promotor,



Dr. Nurul Hak, M.Hum.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF  
KH HASYIM ASY'ARI TERHADAP PENJAJAH  
BELANDA DAN JEPANG (1905-1947)**

yang ditulis oleh:

N a m a : Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.  
N I M : 12300016038  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 7 Juni 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 5 Desember 2018

Penguji,



Prof. Dr. H. Machasin, MA.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF  
KH HASYIM ASY'ARI TERHADAP PENJAJAH  
BELANDA DAN JEPANG (1905-1947)

yang ditulis oleh:

N a m a : Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.  
N I M : 12300016038  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 7 Juni 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 6 Desember 2018

Penguji,



Prof. Dr. Djoko Suryo



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF  
KH HASYIM ASY'ARI TERHADAP PENJAJAH  
BELANDA DAN JEPANG (1905-1947)**

yang ditulis oleh:

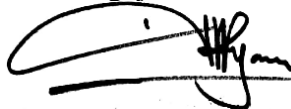
N a m a : Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.  
N I M : 12300016038  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Sejarah Kebudayaan Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 7 Juni 2018, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 7 Desember 2018

Penguji,



Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag.

## ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji tentang sikap kooperatif dan non-kooperatif KH Hasyim Asy'ari terhadap Penjajah Belanda dan Jepang, yang dimulai tahun 1905 sampai 1947. Permasalahan pokoknya adalah; 1) Mengapa KH Hasyim Asy'ari bersikap kooperatif dan non-kooperatif terhadap Penjajah Belanda dan Jepang? 2) Bagaimanakah bentuk sikapnya tersebut?, dan 3) Apa tujuannya bersikap non-kooperatif dan kooperatif terhadap mereka?

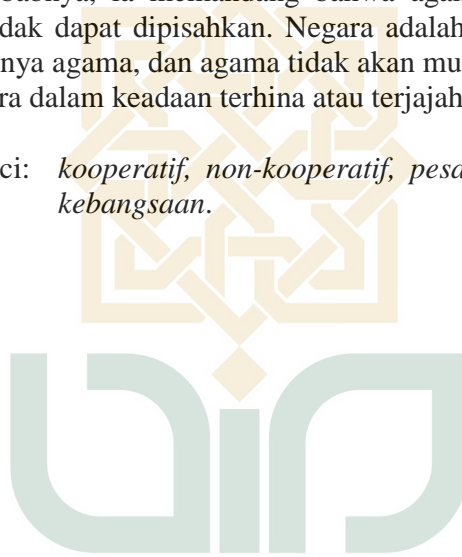
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran upaya KH Hasyim Asy'ari dalam bersikap terhadap penjajah, berdasar atas beberapa kebijakan mereka terhadap agama dan bangsa. Selanjutnya menganalisis tujuan dari sikapnya tersebut, yang diekspresikan baik melalui tindakan dan fatwa-fatwanya, maupun keputusan PBNU. Penelitian ini meminjam Teori Aksi T. Parsons dan Teori Identitas Sosial H. Tajfer dengan pendekatan biografis dan sosiologis, serta menggunakan metode sejarah Louis Gottschalk yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). KH Hasyim Asy'ari bersikap non-kooperatif atau kooperatif terhadap penjajah disebabkan pelaksanaan politik dan kebijakan mereka terhadap Pribumi. Berbagai kebijakan Belanda, utamanya pada masalah ekonomi dan agama, banyak menimbulkan resistensi dari rakyat, khususnya umat Islam. Namun bersikap kooperatif terhadapnya pada waktu tertentu tidak dapat dihindarkan, karena mereka adalah penguasa. Sementara itu, kepada Jepang, Selain *Saikeire* yang ia tentang, penerapan politik dengan berbagai macam kebijakannya dapat ia terima, khususnya yang berpotensi menguntungkan golongan Islam., 2). Bentuk sikapnya sangat terkait dengan situasi dan kondisi, selain dalam soal agama, yang sikapnya sangat jelas dan tegas. Pada masa Belanda, bentuk sikapnya ia ekspresikan dalam berbagai macam tindakan dan fatwa, terkadang juga melalui keputusan PBNU. Sementara itu, pada masa Jepang sikap non-kooperatifnya ia ekspresikan dengan fatwa, sedang sikap kooperatifnya dengan terlibat di dalam pemerintahan dan badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang., 3).

Tujuan bersikap radikal terhadap Belanda adalah untuk menjaga agama, mempertahankan identitas budaya, harga diri bangsa, kemerdekaan, dan kedaulatan negara. Ia bersikap radikal terhadap Penjajah Jepang untuk menjaga kemurnian agama, serta bersikap moderat untuk keselamatan, keberlangsungan, dan keberhasilan perjuangan. Semua sikapnya dilandasi atas teologi dan nasionalisme-nya yang religius, dan pertimbangan sosiologis.

Akhirnya, sebagai sebuah temuan, KH Hasyim Asy'ari membuktikan bahwa, ternyata teologi keagamaan itu paralel dengan semangat kebangsaan, bahkan menjadi dasar patriotisme dan nasionalisme dalam menentang penjajah. Itulah sebabnya, ia memandang bahwa agama, bangsa, dan negara tidak dapat dipisahkan. Negara adalah tempat tumbuh kembangnya agama, dan agama tidak akan mulya kalau bangsa dan negara dalam keadaan terhina atau terjajah.

Kata kunci: *kooperatif, non-kooperatif, pesantren, kiai, dan kebangsaan.*



## ABSTRACT

This dissertation studies KH Hasyim Asy'ari's standpoints, both cooperative and uncooperative ones, towards Dutch and Japanese imperialism from 1905 to 1947. The questions are: 1) Why was KH Hasyim Asy'ari in cooperative and uncooperative states?, 2) How did he make his states noticeable?, and 3) What were the goals?

This descriptive analysis literature study describes KH Hasyim Asy'ari's struggle out of unfavourable policies on the people's religion and their nation. Then, the goals of his actions expressed in fatwas and decisions of NU Headquarters (PBNU) were analysed using Action Theory from T. Parsons and Social Identity theory from H. Tajfer with biographical and sociological approaches. In addition, a historical method from Louis Gottschalk was also used. The method constitutes four steps: heuristic, verification, interpretation, and historiography.

The results show that 1) KH Hasyim Asy'ari's cooperative or uncooperative standpoint was due to the native's resistance against economy and religion policies implemented by the Dutch imperialist. Besides, being cooperative was, at a certain time, inevitable as the Dutch were at rule. While with the Japanese's politics which benefitted moslem in particular, he behaved cooperatively. Yet *Saikei* was one KH Hasyim opposed. 2) His position was firm when dealing with religion but was flexible with others. Under Dutch colonialism, he did the actions, wrote fatwas, and made decisions in NU Headquarters. While uncooperative state during Japanese ruler was expressed through fatwas, his involvement in the government and Japanese-formed institutions was the expression of cooperativeness. 3) The aims of being uncooperative against the Dutch were to protect religion, maintain culture identity, dignity, freedom, and unity. On the other hand, security, survival and struggle underlay the cooperativeness. All of these points were based on theology, nationalism, and religiosity of his with thorough sociology consideration.

It can be inferred that KH Hasyim Asy'ari proved that religion theology is parallel to spirit of nationality and drives

nationalism and patriotism to fight against colonization. That is why he viewed that religion, nation and its people could not be separated. A country is a place for religion to live and grow its rituals. Therefore, religion will never be honorable when the country where it lives is insulted and colonized.

Keywords: cooperative, uncooperative, Islamic boarding school, *kiai*, nationality



## ملخص البحث

ناقش هذا البحث مواقف الكياهي الحاج هاشم أشعري المتمعونة وغير المتمعونة تجاه المستعمرين الهولنديين واليابانيين، وهي المواقف التي أخذته الكياهي الحاج هاشم أشعري في عام ١٩٠٥ حتى عام ١٩٤٧. المشاكل الرئيسية هي: (١) لماذا كان الكياهي الحاج هاشم أشعري يتعاون مع هؤلاء المستعمرين، ولا يتعاون مع هؤلاء في وقت آخر؟ (٢) ما هي مواقفه؟ و (٣) ما هو الهدف من تعاونه وعدم تعاونه معهم؟

هذا البحث يعد بحثاً مكتيباً واستخدم تحليلاً وصفيًا لتقديم لمحة عامة عن جهود الكياهي الحاج هاشم أشعري في تعامله مع المستعمرين، على أساس بعض سياساتهم نحو الدين والأمة. كما رمى هذا البحث لتحليل أهداف هذه المواقف، والتي يتم التعبير عنها من خلال أفعاله وفتاواه، وكذلك قرارات الرئاسة العامة لنهضة العلماء. استعار هذا البحث نظرية عامة نحو العمل لتالكوت بارسونز (Talcott Parsons) ونظرية الهوية الاجتماعية لهنري تاجفيل (Henri Tajfel) مع أسلوب السيرة الذاتية والاجتماعية، وطريقة لويس جوتسكال (Louis Gottschalk) التاريخية التي تشمل أربع مراحل، وهي الاستكشاف والتحقق والتفسير والتأريخ.

وصل هذا البحث إلى ما يلي: (١) اتخذ الكياهي الحاج هاشم أشعري موقفين بين متعاون وغير متعاون مع المستعمرين بسبب تطبيق سياساتهم تجاه السكان الأصليين. لقد تسببت السياسات الهولندية المختلفة، خاصة في القضايا الاقتصادية والدينية، مقاومة كبيرة من قبل الناس، ولا سيما المسلمين. ولكنه كان يضطر أن يتعاون مع الهولنديين في وقت آخر، لأنهم أصحاب الأمر في البلد. أما مع اليابان، فيعترض الكياهي الحاج هاشم أشعري على الساكيري (Saikere) أي احترام الشمس والركوع نحو شروق الشمس مثلما يعمله اليابانيون، ولكنه كان يقبل بعض سياسات اليابان التي قد تفيد المسلمين. (٢)



وكان موقفه يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع والظروف، ما عدى في أمور دينية، فموقفه كان واضحا جدا وحازما. وفي عهد الاستعمار الهولندي، عبّر عن موقفه في أنواع مختلفة من الأفعال والفتاوى، وكذلك من خلال قرارات الرئاسة العامة لنهضة العلماء. وأما في عهد الاستعمار الياباني فأعرب عن موقفه الغير متعاون بإصدار الفتاوى، بينما كان يتعاون مع اليابان في اشتراكه في الحكومة والهيئات التي شكلتها الحكومة اليابانية. (٣) إن الهدف من عدم تعاونه مع المستعمر الهولندي هو من أجل الدين والحفاظ على الهوية الثقافية والكرامة الوطنية والاستقلال وسيادة الدولة. أما موقفه ضد اليابان فيهدف إلى الحفاظ على الدين الحنيف. بينما كان يتعاون مع اليابان من أجل السلامة والاستمرارية ونجاح الكفاح. وتستند جميع مواقفه على العقيدة السليمة والقومية الدينية وكذلك على اعتبارات اجتماعية ناضجة.

فأثبت الكياهي الحاج هاشم أشعري أن العقيدة الدينية توازي القومية، حتى أكد أن العقيدة الدينية هي أساس الوطنية والقومية في القيام ضد الاستعمار. لهذا السبب، يرى الكياهي الحاج هاشم أشعري أن الدين والأمة والدولة لا يمكن فصلها عن الآخر. إن الدولة هي المكان الذي نعى فيه الدين والمأوى الذي أقيمت فيها لطقوس الدينية، لذا لا يمكن الدين أن يترقى إذا كانت الأمة أو الدولة ضعيفة أو تحت الاستعمار.

الكلمات المفتاحية: المتعاون، وغير المتعاون، المعهد الإسلامي،

الكياهي، الأمة

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

## A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Šā’	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā’	r	er
ز	Zā’	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā’	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Žā’	ž	zet (dengan titik bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنِّنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

## C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	a	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
Kasrah	i	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
Ḍammah	u	سُدُسٌ وَخُمْسٌ وَثُلُثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣuluṣ</i>

## D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	ā	فَتَّاحٌ رَزَاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
Kasrah	ī	مِسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
Ḍammah	ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

## E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathāh</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fathāh</i> bertemu <i>yā</i> ' mati	ai	مهيمن	<i>muhaimin</i>

## F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

## G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زَوْجَةٌ جَزِيلَةٌ	<i>zaujah jazīlah</i>
جَزْيَةٌ مُحَدَّدَةٌ	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "*al-*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تَكْمِلَةُ الْمَجْمُوعِ	<i>takmilah al-majmū'</i>
حَلَاوَةُ الْحَبِيبَةِ	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “*t*” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

#### H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “*al-*”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā’il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “*l*” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ẓahab</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah Allah SWT, disertasi yang berjudul "SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF KH HASYIM ASY'ARI TERHADAP PENJAJAH BELANDA DAN JEPANG (1905-1947)" yang diajukan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Sejarah Kebudayaan Islam pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penulisan disertasi ini, di samping karena adanya taufiq dan inayah Allah SWT, juga atas jasa baik banyak pihak, dan untuk itu secara tulus dari hati yang paling dalam, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka semua, dengan iringan do'a, semoga Allah berkenan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Mereka itu adalah:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. (Rektor), Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. (Direktur Pascasarjana), Dr. Moch Nur Ichwan, MA. (Wakil Direktur), Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. (Ketua Program Studi Doktor), dan seluruh jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis atas bimbingan, arahan, bantuan, pemberian fasilitas, dan pelayanannya yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, sampai terselesaikannya disertasi ini.
2. Prof. Dr. H.M. Abdul Karim, MA., MA., dan Dr. Nurul Hak, M.Hum., selaku promotor dalam penyusunan disertasi ini, yang tidak pernah bosan dan lelah dalam memberikan arahan dan bimbingan, serta kesediaannya untuk meluangkan waktu guna menelaah dan mengoreksi hasil penulisan disertasi ini, di sela-sela kesibukan mereka yang sangat padat. *Jazakum Allah Ahsan al-Jaza'*.
3. Prof. Dr. H. Machasin, MA., Prof. Dr. Djoko Suryo dan Dr. Hj. Siti Maryam, M.Ag., selaku Penguji yang



telah memberikan banyak masukan dan perbaikan demi kesempurnaan penulisan disertasi ini.

4. Bapak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya beserta seluruh staff, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu meneruskan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama Republik Indonesia atas bantuan beasiswa kepada penulis dalam menempuh pendidikan S3 ini.
6. Kepada KH Abdul Hakim (Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang), Gus Zaki Hadzik (cucu KH Hasyim Asy'ari di Tebuireng) atas kesediannya untuk wawancara. KH Saleh Hayat (Bangil), Gus Mumazziq (Probolinggo), KH Mun'in DZ, Wasekjend PBNU (Jakarta) dan Gus Zainul Milal Bizawie (Jakarta), yang selalu bersedia untuk berdiskusi dan memberikan masukan-masukan penting bagi penulis. Juga kepada Dr. KH Sofwan Manaf, M.Si., Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk bermarkas di pondoknya selama penulis hunting data di Jakarta. Kiranya, atas budi baik mereka semua, penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada orang tua kandung penulis; H. Abu Bakar (alm) dan Hj. Siti Zaenab (almh) atas pengorbanan mereka yang luar biasa dalam mendidik penulis. Kepada mertua penulis; Drs. H. Abdul Munif (alm) dan Hj. Halimah yang selalu mensupport penulis untuk meneruskan studi. Semoga amal baik mereka semua diganjar oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.
8. Kepada istri tercinta dan anak-anak tersayang, atas segala pengertian, dukungan, dan kesabarannya yang luar biasa selama penulis melaksanakan studi. Semoga Allah SWT mengangkat derajat mereka atas semua kesabaran dan keikhlasannya. Kepada merekalah karya ini sesungguhnya didedikasikan.
9. Kepada kakak penulis, Dr. M. Yunus Abu Bakar, MA. beserta istri Dr. Mardiyah, M. Ag, kakak ipar penulis,

Prof. Dr. KH Ahmad Zahro MA., (UIN Sunan Ampel Surabaya), karib penulis Dr. M. Taufiki Ismail, M.Ag, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Dr. KH Munir Zuhdi, M. Ag. (Dekan Fak. Syariah IAIN Ponorogo), seluruh kawan-kawan di S3 Studi Islam Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan kawan-kawan mabiters di Uinsa Surabaya atas doa dan supportnya kepada penulis.

10. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membantu dalam proses penyusunan disertasi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Sekali lagi, karena jasa baik mereka semualah disertasi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih, teriring do'a kepada Allah SWT, semoga menjadi amal saleh bagi mereka, dan semoga disertasi ini memberi manfaat, terutama bagi penulis dan bagi semua yang berkepentingan, khususnya dalam bidang Sejarah Kebudayaan Islam. Amin.

Penulis,



Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.  
09.34.721/S3

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan Rektor .....	ii
Yudisium.....	iii
Dewan Penguji .....	iv
Pernyataan keaslian dan bebas Plagiarisme .....	v
Pengesahan Promotor.....	vi
Nota Dinas.....	vii
Abstrak.....	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin .....	xviii
Kata Pengantar .....	xxii
Daftar Isi.....	xxv
Daftar Diagram/Tabel/Gambar .....	xxix
Daftar Lampiran.....	xxx
Daftar Istilah.....	xxxii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	15
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Kerangka Teori.....	21
1. Teori Aksi dan Teori Identitas Sosial.....	21
2. Kooperatif dan Non-kooperatif .....	25
3. Kiai dan Ulama .....	26
G. Metode Penelitian.....	29
1. <i>Heuristik</i> .....	30
2. Kritik (Verifikasi) Sumber .....	34
3. Interpretasi.....	35
4. Historiografi .....	36
H. Sistematika Pembahasan.....	36
 BAB II : MASA AKHIR KOLONIALISME BELANDA DAN JEPANG PADA PARUH PERTAMA ABAD XX M SERTA SIKAP KOOPERATIF DAN NON-KOOPERATIF ORGANISASI SOSIAL POLITIK DI INDONESIA .....	 39

A. Paruh Pertama Abad XX M Sebagai Akhir Kolonialisme di Indonesia.....	39
1. Akhir Kolonialisme Belanda di Indonesia .....	42
2. Pendudukan Jepang .....	46
3. Munculnya Faham Nasionalisme di Indonesia .....	49
4. Berdirinya Organisasi-organisasi Islam .....	52
B. Non-kooperatif dan Kooperatif Organisasi-organisasi Politik dan Sosial Pada Akhir Masa Penjajahan di Indonesia .....	55
1. Pengertian dan Asal Mula Timbulnya Sikap Kooperatif dan Non-Kooperatif.....	55
2. Kooperatif dan Non-kooperatif Menurut Para Tokoh Bangsa .....	59
C. Sikap Kooperatif dan Non-Kooperatif Organisasi Sosial dan Partai Politik di Indonesia .....	63
1. Partai-partai Kooperatif .....	63
2. Partai-partai Non-Kooperatif.....	67
3. Organisasi-organisasi Islam.....	83
<b>BAB III : BIOGRAFI KH HASYIM ASY'ARI .....</b>	<b>95</b>
A. Latar Belakang Keluarga .....	95
B. Riwayat Pendidikan.....	98
1. Dari Pesantren ke Pesantren .....	98
2. Mekah al-Mukarramah (1892 dan 1893-1899 M).....	101
C. Ikrar Perjuangan .....	113
D. Aktifitas dalam Organisasi.....	114
1. Nahdlatut Tujjar (1918) .....	115
2. Nahdlatul Ulama (1926) .....	118
3. Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI/1937) .....	122
4. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (1943).....	125
E. Rantai Intelektual.....	127

F. Karya Ilmiah.....	134
G. Pandangan Hidup ( <i>Worldview</i> ) .....	140
1. Agama Islam <i>ala</i> Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.....	144
2. Politik Sunni .....	145
 BAB IV : POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA DAN SIKAP KOOPERATIF SERTA NON-KOOPERATIF KH HASYIM ASY'ARI TERHADAPNYA ....	153
A. Politik Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia.....	153
1. Eksploitasi yang Berlebihan Terhadap Sumber Daya Alam dan Manusia.....	156
2. Politik <i>Devide et Impera</i> .....	159
3. Politik Islam Hindia Belanda .....	162
4. Ketidak-bebasan Menjalankan Syariat Agama dan Program Kristenisasi .....	165
5. Politik Asosiasi.....	168
B. Sikap Kooperatif dan Non-Kooperatif KH Hasyim Asy'ari terhadap Kolonial Belanda .....	180
1. Bentuk Sikap Kooperatif .....	183
2. Bentuk Sikap Non-Kooperatif Pra-proklamasi Kemerdekaan RI (1905-1945).....	197
3. Bentuk Sikap Non-Kooperatif Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI (1945-1947) .....	214
 BAB V : POLITIK DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH BALATENTARA JEPANG SERTA BENTUK SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF KH HASYIM ASY'ARI TERHADAPNYA .....	231
A. Politik Pemerintahan Balatentara Jepang di Indonesia .....	231

1. Organisasi Pemerintahan .....	231
2. Politik Penjajahan Dai Nippon .....	235
3. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Dai Nippon yang Menguntungkan Golongan Islam .....	246
B. Sikap Non-Kooperatif dan Kooperatif ..	257
1. Bentuk Sikap Non-Kooperatif: Mengharamkan <i>Saikerei</i> (1942) .....	259
2. Bentuk Sikap Kooperatif .....	261
C. Bertaktik “Setengah Isi” untuk Kemaslahatan Perjuangan .....	282
 BAB VI : TUJUAN DAN PENGARUH SIKAP NON-KOOPERATIF DAN KOOPERATIF KH HASYIM ASY’ARI TERHADAP PENJAJAH BELANDA DAN JEPANG .....	285
A. Dasar Bersikap Dalam Menghadapi Penjajah .....	286
1. Teologis .....	286
2. Nasionalisme Relijius .....	290
3. Sosiologis .....	294
B. Tujuan Sikap dan Tindakan KH Hasyim Asy’ari Terhadap Kolonial Belanda dan Jepang .....	299
1. Terhadap Pemerintahan Belanda .....	301
2. Terhadap Pemerintahan Jepang .....	314
C. Pengaruh Sikap Non-Kooperatif dan Kooperatif KH Hasyim Asy’ari .....	323
1. Pengaruh Atas Sikap Kooperatif .....	323
2. Pengaruh Atas Sikap Non- kooperatif .....	327
 BAB VII : PENUTUP .....	331
A. Kesimpulan .....	331
B. Saran .....	335
 DAFTAR PUSTAKA .....	335
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	357
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	367



## DAFTAR DIAGRAM / TABEL / GAMBAR

### DIAGRAM :

- Diagram 1 Rantai Intelektual KH Hasyim Asy'ari KH Hasyim Asy'ari., 131
- Diagram 2 Silsilah/rantai intelektual KH Hasyim Asy'ari, 132
- Diagram 3 Susunan Organisasi Pemerintahan Jepang secara Vertikal, 233

### TABEL :

- Tabel 1 Hierarki tata pemerintahan pada masa Belanda, 154
- Tabel 2 Mosi PBNU Kepada Pemerintah Hindia Belanda, 192
- Tabel 3 Klasifikasi Sikap Non-kooperatif dan Kooperatif KH Hasyim Asy'aari Terhadap Kebijakan Belanda, 205
- Tabel 4 Klasifikasi Sikap Non-Kooperatif dan Kooperatif KH Hasyim Asy'ari Terhadap Jepang, 281

### GAMBAR :

- Gambar 1 Pakaian Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai NU lainnya pada Muktamar NU di Magelang tahun 1939, 202
- Gambar 2 Pakaian santri di salah satu sekolah Nahdlatul Wathan pada awal Abad XX, 203
- Gambar 3 Laskar Hisbullah, 255

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 KH Hasyim Asyari (Koleksi Gus Zaki Tebuireng Jombang), 357
- Lampiran 2 Cikal Bakal Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, 357
- Lampiran 3 Warta Besoekei Shuu (Bagian Basa Madoera), terbit pada 24 September 2604 (1944), 358
- Lampiran 4 Harian Kedaulatan Rakjat, Resolusi Jihad PBNU Oktober 1945 dimuat pada tanggal 26 Oktober 1945 (Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta), 358
- Lampiran 5 Mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda Hasil Keputusan Mukhtar NU ke-14 di Magelang 1939 M. ("Berita Nahdlatul 'Oelama' ", koleksi PBNU), 359
- Lampiran 6 Mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda Hasil Keputusan Mukhtar NU ke-15 di Surabaya 1940 M. ("Berita Nahdlatul 'Oelama' ", koleksi PBNU), 359
- Lampiran 7 Permohonan Izin Pengesahan Organisasi NU Kepada Pemerintahan Balatentara Jepang tahun 1943. (Koleksi KH Sholeh Hayat Bangil Pasuruan), 360
- Lampiran 8 Surat Permohonan Kepada Pemerintah Balatentara Jepang untuk mendirikan NU Cabang Sidoarjo (Koleksi KH Sholeh Hayat Bangil Pasuruan), 361
- Lampiran 9 Berita Nahdlatul 'Oelama' pada Kongres (Mukhtar) NU ke-3 di Surabaya. Tulisan menggunakan huruf pegon dan berbahasa Jawa halus (Koleksi Museum NU Surabaya), 361
- Lampiran 10 Cover Putusan Kongres NU ke 10 di Surakarta 1935 dan Berita NU yang berisi berita tentang Kongres NU di Banjarmasin tahun 1936 (Koleksi PBNU), 362
- Lampiran 11 Cover Berita NU edisi Kongres 1937 dan Putusan Kongres Jamiyyah NU ke 11 1938 (Koleksi PBNU), 363

Lampiran 12 *Staatblad van Nederlandsch-Inde*; Laporan Bantuan Keuangan Pemerintah Belanda Kepada Agama Katolik, Protestan, dan Islam tahun 1938 (Koleksi ANRI Jakarta), 364



## DAFTAR ISTILAH

<i>Aufklarung</i>	: Pencerahan
<i>Aza</i>	: Dukuh
<i>Bisya&gt;rah</i>	: Pengetahuan yang Didapat Melalui Istikharah
<i>Chudancho</i>	: Komandan Kompi
<i>Cuo Sangi In</i>	: Dewan Penasehat Pusat
<i>Daidancho</i>	: Komandan Batalyon
<i>Fujinkai</i>	: Organisasi Wanita
<i>Gumi</i>	: Rukun Tetangga/RT
<i>Gun</i>	: Kawedanan
<i>Gunsaikan</i>	: Kepala Staff Tentara, yang menjalankan pekerjaan sehari-hari dalam Pemerintahan Balatentara Jepang
<i>Gunseibu</i>	: Kantor Pemerintahan Dai Nippon Tingkat Daerah
<i>Gunseikan</i>	: Kepala Staff Tentara, sebagai Gubernur Militer.
<i>Gunseikanbu</i>	: Pemerintah Pusat
<i>Gunsireikan</i>	: Panglima Tentara
<i>Heiho</i>	: Prajurit Pembantu Tentara Jepang
<i>Hinomaru</i>	: Bendera Jepang
<i>Jawa Hooke Kai</i>	: Kebaktian Rakyat Jawa
<i>Kaibodan</i>	: Barisan Pembantu Polisi
<i>Kaigun</i>	: Angkatan Laut
<i>Keimubu</i>	: Departemen Kepolisian
<i>Ken</i>	: Kabupaten
<i>Kompeitai</i>	: Korp Polisi Militer
<i>Koo</i>	: Kepala Kerajaan
<i>Kooti</i>	: Kerajaan
<i>Kooti/Kochi</i>	: Sebutan Daerah Istimewa
<i>Kootubu</i>	: Departemen Lalu Lintas
<i>Ku</i>	: Desa
<i>Nippon</i>	: Jepang
<i>Romusha</i>	: Kerja Paksa
<i>Saiko Shikikan</i>	: Panglima Tertinggi
<i>Sangyobu</i>	: Departemen Perekonomian
<i>Seinendan</i>	: Barisan Pemuda

<i>Sekeirei</i>	: Membungkuk Sembilan Puluh Derajat ke arah Timur Penghormatan Kepada Kaisar Jepang
<i>Sendenbu</i>	: Departemen Penerangan dan Propaganda
<i>Shumubu</i>	: Kantor Urusan Agama masa Jepang
<i>Shumuka</i>	: Seksi Urusan Agama Tingkat Daerah masa Jepang
<i>Si</i>	: Kotapraja
<i>Sihoobu</i>	: Departemen Kehakiman
<i>Son</i>	: Asistenan
<i>Soomubu</i>	: Departemen Umum
<i>Syuu</i>	: Karisedenan
<i>Tonarigumi</i>	: Rukun Tetangga
<i>Uleebalang</i> (Aceh)	: Pemimpin Adat
<i>Zaimubu</i>	: Departemen Keuangan



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam Sejarah Nasional Indonesia, masa awal hingga menjelang pertengahan Abad XX M adalah masa pergolakan dan perjuangan panjang dalam rangka meraih kemerdekaan dan mempertahankannya. Pada awal dasawarsa abad ini, berdirilah beberapa organisasi yang menjadi pertanda kebangkitan nasional, yaitu masa dimulainya perjuangan melalui jalur diplomasi dan politik, yang berlangsung hingga Belanda dikalahkan oleh Balatentara Jepang. Sementara itu, pada masa pendudukan Jepang, situasi mengarahkan kepada perjuangan mencapai kemerdekaan dalam bentuk yang berbeda, tidak melawan secara frontal, tetapi mendekat untuk belajar banyak hal, khususnya ilmu kemiliteran modern yang belum dimiliki oleh bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Masa hampir setengah abad itu, pada dasarnya bukanlah waktu yang terlalu lama dalam konteks sejarah bangsa semacam Indonesia, namun masa itu adalah waktu yang sangat urgen dalam perjalanan Indonesia sebagai suatu bangsa yang berusaha meraih kemerdekaan dari penjajahan yang sangat panjang.

Hingga menjelang akhir dasawarsa kedua, organisasi-organisasi yang muncul pada awal Abad XX M tersebut belum sampai kepada fase identitas politiknya, karena cenderung disibukkan oleh konsolidasi ke dalam dan masih dalam taraf

---

<sup>1</sup> Selain perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh KH Zainal Mustofa di Sukamanah dan Supriyadi di Blitar, hampir tidak ada perlawanan bersenjata yang berarti yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia melawan Jepang, bahkan kedua perlawanan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perlawanan yang besar dan berlangsung lama. Superioritas Jepang dalam peperangan besar dan sikap represif balatentaranya membuat bangsa Indonesia berfikir panjang untuk bersikap frontal dan radikal terhadap penjajah dari Asia tersebut.

perkembangan awalnya.<sup>2</sup> Itulah sebabnya, organisasi-organisasi tersebut cenderung bersikap kooperatif terhadap pemerintah penjajah. Kecenderungan mereka bersikap demikian dapat dilacak pada peristiwa masa itu. Saat Perang Dunia I meletus yang juga mengancam wilayah Hindia Belanda, ide adanya mobilisasi tenaga muda untuk mempertahankan tanah air oleh pemerintah kolonial disambut baik oleh dua organisasi penting; Budi Utomo (BU) dan Sarikat Islam (SI).<sup>3</sup> Sungguhpun pada akhirnya mobilisir itu gagal dibentuk, namun BU menelorkan ide dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat yang direspon dengan segera oleh pemerintah dengan dibentuknya *Volksraad* pada tahun 1917. BU dan SI tercatat mengirimkan wakil-wakil mereka di dalam dewan gabungan antara Pribumi dan Belanda tersebut.<sup>4</sup> Keterlibatan keduanya dalam *Volksraad*, mencerminkan sikapnya yang kooperatif terhadap gubernemen Hindia Belanda.<sup>5</sup> Kiranya situasi dan kondisi saat itu belum memungkinkan adanya organisasi yang bersifat radikal terhadap penjajah, sebagaimana kemunculan Indische Partij (IP) yang hanya berumur sekitar enam bulan saja.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 120.

<sup>3</sup>Persetujuan SI tersebut berlaku, apabila pemerintah mau membentuk *Volksraad*. Pringgodigdo, A, K, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1964), 18.

<sup>4</sup>Ide itu ditelorkan dalam konggresnya di Bandung. Dewan rakyat ini tidak sama dengan parlemen, karena dewan ini hanya diberi kekuasaan sebagai penasehat, dan tidak dapat merubah pemerintahan. Adanya *Volksraad* memberi arti bahwa sikap kerjasama betul-betul nyata adanya, sebab *Volksraad* diisi gabungan antara orang-orang Pribumi dan Belanda. Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional; dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 35-37.

<sup>5</sup> Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 121. Budi Utomo selama ini memang cenderung bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, namun karena pendekatan Indische Partij, pada tahun 1915, Budi Utomo mulai bergerak ke arah politik. Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional, dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 81.

<sup>6</sup>Dalam catatan sejarah, hanya Indische Partij (IP), berdiri pada Desember 1912, yang sejak didirikannya betul-betul bercirikan organisasi politik dan berprogram nasionalisme dalam pengertian modern. Melalui surat kabar *De*

Pada dua dasawarsa awal paruh pertama Abad XX M ini, berdiri pula organisasi-organisasi baru di kalangan elit pelajar dan tokoh-tokoh agama, yang sebagian besar didasarkan atas identitas-identitas kesukuan dan keagamaan.<sup>7</sup> Mereka, sebagaimana organisasi sebelumnya, pada awalnya juga bersifat kooperatif terhadap Pemerintahan Hindia Belanda. Namun arti penting keberadaan organisasi-organisasi yang berdasar kesukuan ini adalah terjadinya kongres pemuda yang

---

*Expres*, faham IP disebarluaskan ke berbagai wilayah di Indonesia, yang menegaskan bahwa nasib masa depan bangsa Indonesia terletak di tangan mereka sendiri. Tujuan IP lebih diperjelas dalam musyawarahnya di Bandung, yaitu menumbuhkan dan meningkatkan jiwa integrasi semua golongan untuk memajukan tanah air yang dilandasi jiwa nasional. Karena IP tegas-tegas menyatakan diri sebagai partai politik, maka keberadaannya tidak diakui oleh Belanda. Akhirnya, setelah menerbitkan tulisan tajam karya Suwardi Suryaningrat yang berjudul “*Als ik eens Nederlander was*” (Andaikata aku seorang Belanda), tiga orang tokohnya, lazim disebut dengan “Tiga Serangkai” (Dr. Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat) pada tanggal 18 Agustus 1913 ditangkap dan dijatuhi hukuman buang. Mereka memilih Belanda sebagai tempat pembuangannya, yang segera membuat IP lumpuh dan bubar. Nugroho Notosusanto dan Yusmar Basri (ed), *Sejarah Nasional Indonesia III* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 41-42.

<sup>7</sup> Yang berdasar kesukuan di antaranya adalah; 1) *Jong Java*, nama awalnya adalah *Tri Koro Darmo*, didirikan pada 7 Maret 1915. Agar tidak terlalu menonjolkan sifat ke-Jawa-annya, maka pada tahun 1918, namanya diubah menjadi *Jong Java*. Dengan nama itu, maka seluruh Jawa dapat bergabung, termasuk Jawa Barat. Tujuannya adalah mempersiapkan pemuda-pemuda menjadi bangsa di kemudian hari. Cita-cita *Jong Java* adalah mempersatukan semua penduduk pulau Jawa sehingga merupakan Persatuan Jawa Raya. G. Moeldjato, *Indonesia Abad ke-20; Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 55-56., 2) *Jong Sumatranen Bond* (1918) Didirikan pada tahun 1917 sebagai wadah bagi para pemuda yang berasal dari Sumatera. Sungguhpun namanya demikian, namun organisasi ini aktifnya di Jawa, tempat yang mana para pemuda dari Sumatera banyak datang untuk belajar. *Ibid.*, 56., *Jong Celebes*, *Jong Borneo*, *Jong Minahasa* (1918), *Jong Ambon* (1920), *Pasundan* (1914), *Timorsch Verbond* (1921) Persekutuan orang-orang Timor. Didirikan oleh orang-orang Timor yang keluarganya berasal dari Roti dan Savu untuk melindungi kepentingan-kepentingan rakyat Timor. M. C. Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), 254., Kaum Betawi (1923), dan lain sebagainya.



menetapkan kesepakatan “Sumpah Pemuda 1928”.<sup>8</sup> Di bagian lain, kemunculan Jamiat Khair,<sup>9</sup> al-Isyad, Muhammadiyah,<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Bermula dari adanya berbagai macam organisasi inilah, akhirnya mereka bersepakat mengadakan pertemuan untuk mempersatukan diri, maka diadakanlah kongres pemuda-pemuda Indonesia I di Jakarta pada 30 April-2 Mei 1928, dengan tema “Indonesia Bersatu”. Selanjutnya diadakan kongres pemuda-pemuda II, juga di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928. Kongres pemuda-pemuda II ini menjadi sangat legendaris karena memutuskan “Sumpah Pemuda 1928”. Moeldjanto, *Indonesia Abad ke-20*, 56. “Sumpah Pemuda” menjadi tidak berarti apa-apa, kalau tidak dimulai dan diikuti oleh rangkaian peristiwa yang panjang dan melelahkan. Sekitar sepuluh tahun para pemuda membangun organisasi pemuda yang kemudian dilebur pada hari Sumpah pemuda itu. Selanjutnya, menjadi rujukan semua pemuda dalam perjuangan. William H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982), 414-418.

<sup>9</sup>Jamiyyatul Khair adalah organisasi Islam yang didirikan oleh para keturunan Arab, telah berdiri sejak tahun 1905 dan mendahului semua organisasi modern di Indonesia. Pentingnya Jamiat Khair terletak pada kenyataan bahwa ia adalah organisasi pertama dalam bentuk modern, yang dicirikan dengan adanya anggaran dasar, daftar anggota yang tercatat, dan adanya rapat secara berkala. Namun vitalitasnya segera pudar menyusul terjadinya perpecahan dalam dirinya. Namun sayang, Jamiat Khair tidak dapat menghindarkan dari terjadinya perpecahan dalam dirinya. Pada tahun 1913, para anggota dari golongan bukan sayyid dengan tokoh utamanya Syaikh Ahmad Surkati, keluar dan mendirikan organisasi yang bernama *Jam'iyat al-Islam wal Irsyad al-Arabia* disingkat dengan al-Irsyad. Rupanya kekakuan pendapat golongan sayyid yang berada di dalam Jamiat Khair-lah yang menyebabkan perpecahan tersebut. Perpecahan itu lebih diakibatkan oleh masalah persaingan antara golongan sayyid dan bukan sayyid dalam golongan masyarakat keturunan Arab di Indonesia. Golongan sayyid merasa bahwa mereka lebih dari pada selain sayyid, sedangkan golongan ini tidak sedikit yang mempunyai pengetahuan agama sangat tinggi yang tidak kalah dengan golongan sayyid, seperti Syaikh Ahmad Surkati dan lainnya. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), 71-73.

<sup>10</sup>Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912, lebih memusatkan diri pada kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya, seperti mendirikan sekolah-sekolah yang sistemnya menyerupai sekolah-sekolah Belanda, juga mendirikan rumah sakit, klinik, rumah yatim piatu, menerbitkan buku-buku dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Sungguhpun demikian, tujuan utama organisasi yang banyak dipengaruhi oleh tokoh reformis Mesir Muhammad Abduh ini adalah memurnikan pelaksanaan ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran Kitab Suci dan hadis Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup> Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 29., dan Notosusanto dan Basri (ed), *Sejarah Nasional Indonesia*, 43.

menyusul setelahnya Persis<sup>11</sup> dan Nahdlatul Ulama,<sup>12</sup> menandai kebangkitan perkumpulan berdasar agama. Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan Islam tersebut, juga dapat dikategorikan bersikap kooperatif terhadap pemerintah Belanda.<sup>13</sup> Namun bagi NU, sikapnya yang moderat terhadap pemerintah tidak menghilangkan kekritisannya, bahkan dalam beberapa segi, ia berseberangan dengan pemerintahan kolonial.<sup>14</sup>

Pada sekitar tahun 1920-an, organisasi-organisasi yang ada, semisal BU dan SI, mulai cenderung kepada politik. Selanjutnya, khususnya SI, terbawa ke dalam proses radikalisasi akibat politik kolonial yang reaksioner dan agitasi pemimpin-pemimpin sosialis yang mempengaruhi dan menggeser perjuangan nasional ke arah yang lebih radikal dari pada sebelumnya. Pidato Gubernur Jenderal Van Limburg Sitrum pada tahun 1918 semakin meningkatkan akselerasi kegiatan politik yang berorientasi lebih radikal.<sup>15</sup> Selanjutnya, organisasi-

---

<sup>11</sup> Persis berdiri pada tahun 1923.

<sup>12</sup> NU lahir pada 1926, sungguhpun cikal bakal NU sudah mulai terbentuk di Jawa Timur jauh sebelum kelahirannya, yaitu dengan berdirinya Nahdlatul Wathan (1916), Nahdlatul Tujjar (1918), dan Tasywirul Afkar (1924). MM Billah, "Pergolakan NU & Kelompok Islam: Interplay antara "Gerakan" dengan "Gerakan Tandingan" dan "Tandingan atas Gerakan Tandingan", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 2, 1998, 511-52.

<sup>13</sup> Jamiat Khair dan al-Irsyad, didirikan oleh orang-orang keturunan Arab, yang biasanya berada di wilayah yang mana komunitas masyarakat keturunan Arab bertempat tinggal. *Kapten Arab*, yaitu kepala masyarakat Arab yang berdomisili di suatu tempat, ditentukan oleh Belanda, dan semua masyarakat Arab di wilayah tersebut berada dalam kepemimpinan seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah Kolonial Belanda, dalam hal ini, para penggiat Jamiat Khair dan al-Irsyad berada di dalamnya. Noer, *Gerakan Modern Islam*, 71. Sedangkan Muhammadiyah, karena sistem pendidikan yang didirikannya sesuai dengan kriteria Belanda, maka sekolahnya mendapat subsidi dari pemerintah Belanda. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996), 58.

<sup>14</sup> Pada bab-bab selanjutnya, akan diterangkan lebih detail tentang sikap NU terhadap pemerintah.

<sup>15</sup> Politik progressif dan sikap terbuka seperti yang ditempuh Gubernur Jenderal Van Limburg Sitrum dirumuskan dalam pidatonya yang disampaikan pada tanggal 18 November 1918, menimbulkan harapan-harapan besar bagi kaum pergerakan sehingga kaum pergerakan mengeluarkan tuntutan tentang

organisasi yang ada cenderung bersikap non-kooperatif. Perkumpulan-perkumpulan yang berdasar agama, semisal Muhammadiyah dan NU, mulai berani melancarkan protes keras terhadap pemerintah Kolonial Belanda.

Kondisi ini mengalami perubahan pada pertengahan 1933, sebab utamanya adalah kegoncangan ekonomi dan sikap Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sangat represif, membuat sikap organisasi-organisasi yang ada memutar haluan menjadi semakin lunak. Kalau tidak, pilihan lainnya hanya satu, yaitu membubarkan diri, sebagaimana nasib PNI.<sup>16</sup> Sikap semacam ini berlangsung hingga akhir kolonialisme Belanda, dan diteruskan hingga masa Penjajahan Jepang.<sup>17</sup>

NU, sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan yang lahir masa penjajahan Belanda (1926), tidak lepas dari dinamika dan pasang surut dalam hubungannya dengan penjajah, yang dalam hal ini, personifikasi KH Hasyim Asy'ari menjadi acuan organisasi yang diorganisir oleh para ulama, khususnya kiai pesantren tersebut. Hal ini karena, selain sebagai pendiri dan

---

status Hindia Belanda yang otonom terlepas dari ikatan kolonial dengan Belanda, juga pembentukan perwakilan rakyat yang lebih demokratis. Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah...*, 123

<sup>16</sup>PNI mengalami nasib semacam ini, yang harus membubarkan diri pada April tahun 1930. Moeldjanto, *Indonesia Abad Ke-20*, 51. Namun menurut Suhartono mengatakan bahwa PNI dibubarkan oleh pengurus besarnya pada 1931. Suhartono, *Sejarah Pergerakan...*, 71.

<sup>17</sup>Menurut Onghokham, ada dua hal yang menyebabkan sifat perjuangan pada tahun 1930-an, berbeda dari sebelumnya, tahun 1920-an. Pertama adalah keberadaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, de Jonge yang berhaluan konservatif. Ia dilukiskan sebagai orang yang kasar dan sombong. Ia, dengan tidak menganggap adanya pergerakan nasional, mengatakan bahwa: "Belanda berada di sini (Indonesia) selama 300 tahun lagi....bila perlu dengan pedang dan pentung". Pada masa ini pergerakan nasional mendapat pukulan-pukulan hebat sehingga menimbulkan krisis dalam kehidupan politik pergerakan. Selain dari pada itu, pada tahun 1936-an, pergerakan nasional sedikit banyak memperbaiki kedudukannya dan bangun kembali hanya dalam bentuk dan corak lain serta arah tertentu, sebab semakin lama, pemerintah semakin represif. Strategi baru yang ditempuh adalah dengan kooperatif dan berusaha mencapai Indonesia merdeka melalui jalan legal. Cara-cara agitasi yang dicap sebagai penghasutan oleh pemerintah ditinggalkan. Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), 42-43

pemimpin tertinggi NU (Rais Akbar), ia juga seorang kiai yang dapat dianggap paling *sepuh* dan paling berpengaruh, khususnya di Jawa dan Madura (Indonesia).<sup>18</sup> Ia, dalam menerapkan pola hubungannya dengan Penjajah Belanda, terkadang bersikap lunak (kooperatif), namun terkadang bersikap sangat kritis dan non-kooperatif. Demikian pula pola hubungannya dengan Pemerintahan Balatentara Jepang. Sikapnya yang berbeda dan caranya menyesuaikan dengan konteks antara non-kooperatif dan kooperatif, dalam berhubungan dengan penjajah adalah salah satu bagian episode sejarah dirinya yang unik dan menarik.

Menjelang akhir dasawarsa kedua pada paruh pertama Abad XX M, KH Hasyim Asy'ari lebih memusatkan perhatian dalam membesarkan pesantren Tebuireng, menyusul usahanya untuk membentuk perkumpulan dagang (*Nahdlatut Tujjar*) yang kurang berjalan mulus. Namun takdir menentukan lain, ia dituntut untuk tidak hanya sibuk dalam urusan pesantren, khususnya Tebuireng. Pada pertengahan dasawarsa ke-3 abad ini, tepatnya pada 1926, ia menjadi penentu berdirinya NU, yang membuat kiprahnya dalam pentas nasional menjadi semakin penting, nyata, dan menarik. Dalam kondisi yang sedemikian, sikapnya dalam berhubungan dengan kolonial masih seperti sebelumnya, yaitu antara moderat dan radikal; moderat dalam satu peristiwa namun radikal dan kritis dalam peristiwa lain. Pada Muktamar NU ke-2 tahun 1927 di Surabaya, ia kelihatan dekat dengan utusan pemerintah kolonial

---

<sup>18</sup> KH Hasyim Asy'ari dapat dianggap sebagai kiai yang paling berpengaruh di Jawa dan Madura (Indonesia), terutama setelah wafatnya KH Ahmad Dahlan dan KH Khalil Bangkalan. KH Ahmad Dahlan adalah sahabat KH Hasyim Asy'ari saat menuntut ilmu di KH Shalih Darat Semarang dan di Mekah, meninggal pada tahun 1923. Sementara itu, KH Khalil Bangkalan adalah gurunya sekaligus kiai yang memberinya restu untuk mendirikan organisasi yang dimotori oleh para ulama melalui isyarat-isyarat yang ia berikan dengan perantara KH As'ad Syamsul Arifin Situbondo, meninggal pada tahun 1925.

yang hadir pada pembukaan acara tahunan NU tersebut.<sup>19</sup> Namun pada pada tahun 1927 itu pula, ia melawan pemerintah secara kultural dengan mengeluarkan fatwa haramnya berpakaian yang menyerupai pakaian Belanda.<sup>20</sup>

Selanjutnya pada pembukaan Mukhtar NU ke-3 tahun 1928 di Surabaya, ia memberi apresiasi dengan pujian kepada pemerintah kolonial,<sup>21</sup> dan pada tahun 1929, ia mendaftarkan NU kepada pemerintah untuk mendapatkan legalitas (mendapatkan izin badan hukum) atas berdirinya organisasi sosial keagamaan yang ia pimpin.<sup>22</sup> Adanya pelaksanaan Politik Etis dan Politik Islam Hindia Belanda yang memuat berbagai macam agenda membuatnya bertindak hati-hati agar tidak kehilangan independensinya. Dengan demikian, ia tidak kehilangan sifat kritisnya yang diekspresikan dengan berbagai macam tindakan dan fatwanya hingga berakhirnya kolonialisme Belanda 1942.

Kedatangan Jepang menggantikan Belanda di Indonesia pada tahun 1942 tidak membuat sikap KH Hasyim Asy'ari dalam hubungannya dengan penjajah berubah, yaitu antara non-kooperatif dan kooperatif. Penolakannya untuk melakukan *Saikerei* yang menyebabkannya ditahan oleh Pemerintahan Balatentara Jepang selama kurang lebih 5-6 bulan adalah sikap non-kooperatif-nya yang sangat heroik. Namun karena sikap pemerintahan Balatentara Jepang yang sangat represif membuatnya menyesuaikan taktik dalam perjuangannya menjadi lebih lunak. Selain dari pada itu, perbedaan kebijakan penjajah dalam memandang tokoh agama, khususnya

---

<sup>19</sup> Istilah Mukhtar NU belum digunakan saat itu. Istilah yang digunakan adalah Kongres NU. Namun setelah kemerdekaan, istilah Kongres sudah tidak biasa digunakan, justru Mukhtar NU yang umum digunakan.

<sup>20</sup> Hasyim Asy'ari, *Ziya>dat Ta'li>qa>t 'ala Manzu>mat al-Shaikh Abd Alla>h bin Ya>sin al-Fasuruani* (Tebuireng: al-Maktabah al-Masru'iyah, 1415 H).

<sup>21</sup> Chr. L. M. Penders, *Indonesia; selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942* (St. Lucia: University of Queensland, 1977), 272.

<sup>22</sup> Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), 85.

kiai pesantren, tampaknya menjadi dasar dari perubahan sikapnya. Penerimaannya untuk memimpin Masyumi dan *Shumubu* adalah contoh bagaimana ia bersikap kooperatif dengan pemerintahan militer tersebut.

Dua penjajah terakhir di Indonesia itu, Belanda dan Jepang, mempunyai latar belakang kondisi yang berbeda saat datang ke Indoneisa. Kondisi itu menyebabkannya mempunyai tindakan dan kebijakan yang berbeda pula terhadap Indonesia. Pemerintah Belanda, yang motif ekonominya lebih dominan sebagai sebab kedatangannya ke Indonesia, menerapkan berbagai macam politik dan kebijakan di Indonesia,<sup>23</sup> yang berujung pada timbulnya proses perubahan sosial dan kemiskinan. Perubahan sosial tersebut mengarah kepada dominasi asing yang mengakibatkan terjadinya benturan

---

<sup>23</sup>Politik-politik yang pernah dijalankan oleh Kolonial Belanda di Indonesia adalah sebagai berikut; Politik Kolonial Konservatif (1800-1848), politik *Cultuurstelsel* (1830-1870), politik Kolonial Liberal (1870-1900), Politik Etis (1900-). Politik Etis yang mulai dilakukan pada awal Abad XX, membawa banyak agenda, seperti asosiasi, pembatasan pengajaran agama dengan Ordonasi Guru dan sebagainya. Di lain pihak Jepang yang datang menggantikan Belanda juga mempunyai banyak agenda politis, yang kesemuanya memerlukan sikap yang bijak dari para kiai, sebagai pemimpin informal masyarakat. Politik Kolonial Konservatif adalah politik yang diterapkan oleh Kolonial Belanda menyusul bangkrutnya VOC dan digantikan oleh kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda melanjutkan politik tradisional kompeni dengan tujuan memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan demi keuntungan kerajaan. Politik *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa) diberlakukan oleh Belanda menyusul selesainya Perang Diponegoro. Politik ini memberi keuntungan sebesar 823 juta gulden yang mendorong kemajuan perdagangan dan pelayaran Belanda, menjadi pusat penjualan bahan mentah dan armada dagangnya menjadi nomor tiga di seluruh dunia. Politik Ekonomi Liberal adalah politik yang diberlakukan oleh Kolonial Belanda di Indonesia menyusul diberhentikannya politik tanam paksa. Politik ini disebut dengan politik “pintu terbuka” atau disebut juga dengan periode kapitalisme modern. Pada periode ini perusahaan-perusahaan swasta memasuki Indonesia secara besar-besaran, terutama di bidang perkebunan, dan karena kesuburan tanahnya, Jawa menjadi tempat paling baik untuk ekplorasi kapitalis secara intensif. Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia*, 8-30.

kebudayaan Barat dan lokal.<sup>24</sup> Di lain pihak, pemiskinan yang terjadi akibat *penciptaan* daerah hidup dan munculnya tatanan kultur asing, menambah berat penderitaan rakyat, dan berdasar dari akumulasi semua itu, timbulah ketidak-senangan masyarakat terhadap Kolonial Belanda.<sup>25</sup>

Sementara itu, Jepang yang datang dengan kondisi berhadapan dengan Sekutu, ternyata kebijakannya tak kalah kejamnya dengan penjajah sebelumnya. *Romusha* menjadi mimpi buruk bagi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang represif telah menimbulkan banyak korban dan penderitaan bagi rakyat.<sup>26</sup> Namun perubahan kebijakannya untuk lebih mendekat kepada umat Islam, khususnya kepada para kiai desa yang dilakukan dalam rangka mengharapkan dukungan jika pecah perang melawan Sekutu, membuat adanya perubahan sikap para tokoh agama kepadanya.

---

<sup>24</sup>Politik Ekonomi Liberal menyebabkan terjadinya industrialisasi besar-besaran yang memerlukan tanah luas yang menyebabkan ruang hidup rakyat menjadi semakin sempit.

<sup>25</sup>Snouck Hurgronje, yang selanjutnya memimpin *Kantoor van Inlandsche en Arabische Zaken*, melahirkan kebijakan baru tentang hubungan kolonial dengan umat Islam. Politik Islam Hindia Belanda (*Dutch Islamic Policy*), hasil dari penelitiannya, menjadi pedoman penting bagi pemerintah kolonial dalam bersikap terhadap Pribumi.<sup>25</sup> Namun di lain pihak, pelaksanaan politik itu meningkatkan eskalasi ketidak-senangan umat Islam terhadap pemerintah kolonial, yang diekspresikan dengan sikap menolak semua pengaruh yang berasal dari Kolonial Belanda dan tidak mau berhubungan dengan mereka. Heru Soekadri, *Kiyai Haji Hasyim Asy'ari* (Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Depdikbud, 1980), 84-85. Politik Islam versi Snouck membedakan Islam dalam arti “ibadah” dan Islam dalam arti “kekuatan sosial politik”. Dari pengkategorian semacam ini, ia membagi Islam menjadi tiga, yakni: 1) bidang agama Islam murni (ibadah); 2) bidang sosial kemasyarakatan; dan 3) bidang politik. Menurutnya, masing-masing memerlukan cara pemecahan yang berbeda. Masalah pertama diselesaikan dengan cara memberi kebebasan beribadah. Masalah kedua memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekat kepada Belanda. Adapun masalah ketiga diselesaikan dengan mencegah setiap usaha yang membawa kepada fanatisme dan Pan-Islamisme. Suminto, *Politik Islam...*, 12.

<sup>26</sup>Terdapat sekian banyak kiai yang menjadi korban sikap Jepang ini, dan yang paling menghebohkan adalah sikap Jepang yang menahan KH Hasyim Asy'ari karena ketidakmauannya untuk melakukan seikeirei setiap jam tujuh pagi.



Dengan demikian, situasi dan kondisi yang terjadi pada negeri penjajah dan perbedaan cara pandang dalam melihat golongan mana yang harus didekati untuk mendapatkan dukungan rakyat, menimbulkan perbedaan kebijakan politik mereka terhadap Indonesia sebagai negeri terjajah. Kalau Kolonial Belanda melihat bahwa dengan mendekati para bangsawan dan priyayi, rakyat dapat dikuasai, maka Penjajah Jepang melihat sebaliknya, yaitu dengan mendekati para tokoh agama dan kiai, ia dapat memperoleh dukungan rakyat, dan itu berarti, akan mendapat bantuan dari mereka.

Menyikapi dua penjajah dengan sekian macam agenda masing-masing itu, para kiai berbeda dalam bersikap; ada yang menolak untuk bekerja sama dengan keduanya, ada yang bekerja sama dengan keduanya, ada pula yang menolak bekerja sama dengan yang pertama dan siap bekerja sama dengan yang kedua atau sebaliknya, bahkan ada yang sangat radikal, yaitu melakukan pemberontakan secara fisik.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, KH Hasyim Asy'ari, mengambil sikap berbeda, yaitu memilih yang lebih baik dan harus diambil saat itu, khususnya bagi kepentingan agama dan negara. Ini berarti sikapnya bersifat moderat dan kooperatif dalam menghadapi satu masalah atau sebaliknya, radikal dan non-kooperatif dalam menghadapi masalah lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah sikap organisasi NU yang berada dalam kendalinya terhadap dua negara penjajah tersebut. Beragamnya sikap KH Hasyim Asy'ari dalam berhubungan dengan Kolonial Belanda dan Jepang, caranya menyesuaikan sikapnya dengan situasi dan kondisi (konteks) yang terjadi saat itu adalah hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti dalam konteks sosio-historis akhir kolonialisme dan menjelang kemerdekaan Indonesia.

Secara lebih spesifik, penelitian ini terfokus pada sikap non-kooperatif dan kooperatif KH Hasyim Asy'ari dalam

---

<sup>27</sup>Nurul Hak, "Perubahan Sosial Pesantren di Tasikmalaya pada Paruh Pertama abad XX (1905-1950)", Yogyakarta: Thesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2003. 12-13.



rangka merespon dinamika sosial-politik dan budaya yang berkembang saat itu, khususnya terhadap Penjajah Belanda dan Jepang. Pemilihan sikapnya sebagai fokus kajian didasarkan atas beberapa alasan; pertama, ia adalah kiai yang dianggap paling berpengaruh di Indonesia pada paruh pertama Abad XX M. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan pesantren asuhannya, Tebuireng, yang menjadi kiblat hampir semua pondok pesantren, santri, dan kiai di Jawa dan Indonesia. Selain dari pada itu, organisasi NU, yang dapat dianggap sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, juga berada dalam kendalinya.<sup>28</sup> Kedua, ia menjadi simbol perlawanan dalam menghadapi penjajah, yang dicirikan oleh sikap non-kooperatifnya dalam banyak hal, baik kepada Penjajah Belanda maupun Jepang.<sup>29</sup>

Alasan-alasan di atas, menurut penulis, cukup untuk menjadikan dirinya sebagai objek penelitian, khususnya berkenaan dengan sikapnya terhadap keberadaan Penjajah Belanda dan Jepang yang ia ekspresikan dengan pemikiran, fatwa, dan tindakan selama memimpin pesantren, menjadi tokoh masyarakat, ketua organisasi sosial keagamaan atau politik, dan tokoh kiai pada paruh pertama Abad XX M.

Sebagai suatu kajian sejarah, waktu kajian ini dibatasi mulai dari tahun 1905 dan berakhir tahun 1947. Tahun 1905

---

<sup>28</sup>KH Hasyim Asy'ari adalah kiai yang menjadi simbol keabsahan beberapa organisasi baik sosial mapun politik Islam. Ia adalah "*Rais Akbar*" dengan julukan khusus "*KH Hasyim Asy'ari*" dari Nahdlatul Ulama, organisasi Islam yang dianggap paling besar di Indonesia. Ia juga adalah ketua badan legislatif MIAI, badan federasi dari organisasi-organisasi Islam untuk mengkoordinasikan kegiatan organisasi-organisasi Islam dan menyatukan mereka dalam menghadapi ancaman atau kepentingan bersama yang didirikan pada 18-21 September 1937. Saat Masyumi berdiri, ia diangkat menjadi Ketua Besarnya.

<sup>29</sup>Pada masa revolusi, ia adalah kiai yang tegas membela kedaulatan Negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan Resolusi Jihad untuk melawan Belanda yang bermaksud menjajah kembali Indonesia. Fatwa dan Resolusi Jihad ini menjadi landasan teologis dalam perjuangan membela tanah air, khususnya dalam Perang 10 Nopember 1945 di Surabaya, yang menjadi contoh pembelaan paling sempurna terhadap negara bagi semua rakyat Indonesia.

merupakan tahun maraknya pemberlakuan Politik Etis oleh Pemerintah Hindia Belanda, menyusul Politik Islam Hindia Belanda yang telah diperlakukan di Indonesia lebih dahulu. Kedua politik ini mempunyai agenda yang banyak merugikan agama Islam. Sementara itu, akhir penelitian ini adalah tahun 1947 M, tahun semakin mengerasnya sikap KH Hasyim Asy'ari terhadap Belanda dengan menolak segala sesuatu yang berasal dari Belanda, bahkan bantuannya pun dihukumi haram untuk diterima. Dalam tahun inilah ia berfatwa bahwa haram hukumnya pergi haji, apabila kepergiannya menggunakan kapal bantuan dari Belanda.<sup>30</sup>

Terdapat masa dalam penelitian ini yang berada pasca-kemerdekaan, yaitu tahun 1945 hingga 1947, tahun wafatnya KH Hasyim Asy'ari. Senyatanya, bahwa Kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamkan pada 17 Agustus 1945. Namun kenyataannya, justru empat tahun setelah proklamasi, yakni 1945-1949,<sup>31</sup> adalah tahun yang sangat krusial bagi keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka.<sup>32</sup> Kemerdekaan yang sudah diproklamkan harus dipertahankan dengan perjuangan fisik yang jauh lebih berat dari pada sebelumnya. Karena Pemerintahan Hindia Belanda yang sudah menyerah kepada Balatentara Jepang pada tahun 1942, dengan membonceng Sekutu, datang lagi untuk menggagalkan kemerdekaan RI dengan kekuatan senjata. Oleh karena itu, semua potensi bangsa Indonesia dikerahkan untuk menghadapi

---

<sup>30</sup> Tahun 1947 berada pada tengah-tengah masa Revolusi fisik (1945-1949), masa perjuangan paling berat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam masa ini, karena pemerintah RI tidak sanggup menyediakan kapal, maka Belanda mencoba untuk mengambil hati kaum Muslim dengan menyediakan bantuan kapal untuk pergi haji. Machfoedz Maksoem, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama* (Surabaya: Yayasan Kesatuan Ummat, 1982), 84.

<sup>31</sup> Tahun 1949 adalah tahun yang mana Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia, tepatnya setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda.

<sup>32</sup> Dimaksud adalah tahun 1945 pasca-kemerdekaan hingga pengakuan Belanda atas Kemerdekaan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 di Belanda.

masalah yang berat ini. Pada situasi krusial ini, KH Hasyim Asy'ari, sebagai kiai paling berpengaruh, pemimpin organisasi agama paling besar, dan salah satu tokoh nasional ternama, melakukan peranannya yang sangat penting dan berarti bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda dan Sekutu, yaitu dikeluarkannya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, yang kelak menjadi ruh dan landasan ideologi dalam perang heroik 10 Nopember 1945 di Surabaya.<sup>33</sup>

Pada akhirnya sejarah menuliskan, bahwa seluruh kehidupan KH Hasyim Asy'ari selalu diperuntukkan bagi perjuangan demi agama dan bangsa, dan penyebab wafatnya pada tahun 1947-pun, tidak lepas dari soal perjuangan mempertahankan Negara Indonesia.<sup>34</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pemaparan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa KH Hasyim Asy'ari bersikap kooperatif dan non-kooperatif terhadap Penjajah Belanda dan Jepang?
2. Bagaimana bentuk sikap non-kooperatif dan kooperatif KH Hasyim Asy'ari terhadap Penjajah Belanda dan Jepang?
3. Apa tujuan KH Hasyim Asy'ari bersikap non-kooperatif dan kooperatif terhadap Penjajah Belanda dan Jepang? Bagaimana pengaruhnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang sikap non-kooperatif dan kooperatif KH Hasyim Asy'ari terhadap Kolonial Belanda dan Penjajah Jepang ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal berikut:

---

<sup>33</sup> Resolusi Jihad PBNU 1945 diawali dengan Fatwa Jihad Tebuireng dan diikuti dengan Fatwa dan Resolusi Jihad Porwokerto 1946.

<sup>34</sup> Ia wafat saat mendengar laporan bahwa Kota Singosari, markas tentara Hizbullah dan Sabilillah telah jatuh ke tangan Belanda, dengan korban yang tidak sedikit. Mendengar berita ini, ia sangat terkejut dan berucap; *Masya Allah....Masya Allah....Masya Allah*. Itulah kata terakhir darinya.

1. Menjelaskan proses tumbuhnya nasionalisme di Indonesia, yang ditandai dengan munculnya kesadaran bersyarikat bersama dalam perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat secara umum hingga tujuan yang lebih spesifik, yaitu bernegara yang lepas dari penjajahan.
2. Menjelaskan sumbangsih dan peranan KH Hasyim Asy'ari dalam menumbuhkan dan merajut kerangka patriotisme dan nasionalisme Indonesia melalui pemahaman dan pengamalan yang baik terhadap agama Islam dan hubungannya dengan berbangsa serta bernegara, yang ia aplikasikan dalam pendidikan agama Islam di pondok pesantren, Nahdlatul Ulama, MIAI, dan Masyumi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam kaitan hubungan kiai dengan kolonialisme, khususnya sikap non-kooperatif dan kooperatif terhadap Penjajah Belanda dan Jepang, dan nasionalisme dalam kaitannya dengan agama.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pesantren khususnya dan umat Islam pada umumnya, dalam rangka melacak sejarah kiai dalam menghadapi penjajah di masa sulit, baik itu Penjajah Belanda maupun Jepang. Selain dari pada itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi instansi terkait, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama RI (Kemenag) untuk dituliskan dalam buku-buku sejarah bahwa para santri dan kiai merupakan bagian elemen bangsa yang banyak mempunyai jasa dalam sejarah perjuangan Kemerdekaan Indonesia.

## E. Kajian Pustaka

Sebagai tokoh besar, kiai paling penting pada Paruh pertama Abad XX M, kajian ilmiah tentang kiai dan KH Hasyim Asy'ari sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik itu untuk keperluan penyelesaian studi maupun lainnya. Pada garis besarnya, kajian-kajian itu berkenaan dengan tema-tema sebagai berikut; tentang kiai dan perbedaannya dengan ulama serta peranannya di dalam masyarakat, tentang pemikiran KH Hasyim Asy'ari mengenai teologi Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan pesantren (pendidikan), tentang biografi, dan tentang aktivitas serta pemikiran politiknya. Dalam kajian-kajian tersebut ada yang membahasnya secara khusus, ada pula yang membandingkannya dengan yang lain dalam tema-tema tertentu, atau membahas tentang teologi ahlus Sunnah wal Jama'ah, pesantren, ulama, dan organisasi NU yang tidak dapat menghindarkan untuk tidak turut membahasnya.

Kajian tentang kiai diantaranya telah dilakukan oleh Hiroko Horikoshi,<sup>35</sup> Pijper,<sup>36</sup> dan Ali Machsan Moesa.<sup>37</sup> Sedang kajian khusus tentang KH Hasyim Asy'ari dilakukan oleh Lathiful Khuluq,<sup>38</sup> Muhibbin Zuhri,<sup>39</sup> Rahinah M. Noor,<sup>40</sup> Gugun el Ghuyanie,<sup>41</sup> dan Amiq.<sup>42</sup> Sementara Zamakhsari Dhafier,<sup>43</sup>

---

<sup>35</sup> Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987).

<sup>36</sup> G. F. Pijper, *Beberapa Studi tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950* (Jakarta: UI Press, 1985).

<sup>37</sup> Ali Machsan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta, LKiS, 2007).

<sup>38</sup> Latiful Khuluq, "Hasyim Asyari: Religious Thought and Political Activities 1871-1945" (Thesis Mc Gill University, 1997)

<sup>39</sup> Ahmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Surabaya, Khalista, 2010)

<sup>40</sup> Rahinah M. Noor, *KH Hasyim Asy'ari Memodernisasi NU dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 1910).

<sup>41</sup> Gugun El-Guyanie, *Jihad Paling Syar'i* (Yogyakarta: LKiS, 2010).

<sup>42</sup> Amiq, *Two Fatwas on Jihad against the Dutch Colonisation in Indonesia: A Propagandical Approach to the Study of Fatwas* (Jakarta: Studia Islamica, 1998), vol. 5, No, 3.

<sup>43</sup> Zamakhsari Dhafier, *Tradisi Pesantren tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982).

Endang Turmudzi,<sup>44</sup> Abdurrahman Mas'ud,<sup>45</sup> Fauzan Saleh,<sup>46</sup> Djohan Effendi,<sup>47</sup> dan Mardliyah,<sup>48</sup> membahas tema-tema yang tidak bisa lepas untuk tidak membahasnya.

Horikoshi membahas tentang kiai dengan sangat baik; khususnya berkenaan dengan apa itu kiai, ciri-ciri, kekuatan, dan perbedaannya dengan ulama, atau penghulu. Pembahasannya ini sebenarnya dalam rangka membuktikan bahwa kiai dapat melakukan perubahan sosial, khususnya di wilayah Jawa Barat. Sementara itu Pijper sebetulnya tidak secara langsung membahas tentang kiai, akan tetapi salah satu bab dalam penelitiannya tersebut membahas tentang penghulu, yaitu seorang ahli agama yang menjadi pegawai pemerintah. Karenanya, mau tidak mau, ia harus membahas ahli agama selain penghulu, yaitu kiai, yang keberadaannya sangat penting dalam masyarakat. Adapun Ali Machsan berupaya merekonstruksi makna nasionalisme, khususnya menurut pendapat para kiai, terkait rekonstruksi makna nasionalisme berkaitan dengan agama dalam konteks sekarang. Pembahasan mereka ini tidak langsung membahas tentang KH Hasyim Asy'ari, tetapi membahas makna dan hakekat kiai, sebutan yang melekat kuat pada diri KH Hasyim Asy'ari tersebut.

Pembahasan yang luas tentang diri KH Hasyim Asy'ari dilakukan oleh Khuluq, yang mengupas tentang pemikiran keagamaan dan aktivitas politiknya. Ia menulis tentang sejarah hidup dari yang berkenaan dengan masalah agama hingga

---

<sup>44</sup>Endang Turmudzi, *Struggling For The Umma: Changing Leadership Roles Of Kiai in Jombang, East Java* (Michigan: University Michigan, 2006).

<sup>45</sup>Abdurrahman Mas'ud, *Intellectual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

<sup>46</sup>Fauzan Saleh, *Modern Trends in Islamic Theological Discourse in 20th Century: A Critical Study* (Brill, 2001).

<sup>47</sup>Djohan Effendi, *A Renewal Without Breaking Tradition: The Emergence of a New Discourse in Indonesia' Nahdlatul Ulama During The Aburrahman Wahid Era* (Yogyakarta: Interfidei, 2008).

<sup>48</sup>Mardliyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi: Studi Multi Kasus Pondok Modern Gontor Ponorogo, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng* (Malang, UIN Maliki Press, 2012).

politik, khususnya saat ia berkecimpung di MIAI dan menjadi Ketua Besar Masyumi. Sementara itu, Rohinah dalam penelitiannya memotret karakteristik pemikiran pendidikan dan peranannya sebagai tokoh Islam tradisional dalam memodernkan organisasi NU yang ia pimpin dan usahanya untuk memajukan pendidikan Islam. Signifikansi pendidikan, menurutnya adalah memanusiakan manusia sehingga tercapai derajat takwa secara utuh, mengamalkan segala perintah-Nya, beramal saleh, dan maslahat. Hal ini sejalan dengan predikat manusia sebagai makhluk terbaik di muka bumi. Oleh karena itu, menurutnya, pendidikan harus selalu berlandaskan moral dan etik, tidak boleh tidak.

Selanjutnya Muhibbin memfokuskan penelitiannya kepada peranan KH Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah (baca sunni) yang khas Indonesia. Menurutnya, faham sunni yang ia kembangkan ternyata tidak sebangun persis dengan konstruksi sunni pada era awal, meskipun dalam banyak hal tetap mencerminkan pola umum sunnisme. Muhibbin menemukan fakta bahwa KH Hasyim Asy'ari cenderung berkarakter *defensive* dalam menyikapi isu-isu pembaruan Islam, dan bersifat *offensive* dalam menyikapi keberagaman masyarakat. Namun demikian, menurut Muhibbin, sungguhpun corak pemikiran KH Hasyim Asy'ari dipengaruhi oleh ulama abad pertengahan, seperti Ima>m al-Nawa>wi>, Ima>m al-Subki>, Ibn S}alah}, dan al-Asqala>ni>,<sup>49</sup> namun ia tidak bersifat replikatif, bahkan berhasil merekonstruksi pemikiran mereka dengan mempertimbangkan relevansinya dengan konteks sosio-religious masyarakat.

---

<sup>49</sup> Apa yang dilakukan oleh KH Hasyim Asy'ari dengan merujuk kepada para ulama abad pertengahan yang ahli fikih sekaligus ahli hadis semakin mengukuhkan dirinya sebagai ulama ahli hadis, ini tercermin dari karya-karyanya yang selalu mendasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Di lain pihak, ini juga berdasar pada pertimbangan logis dan praktis, yaitu selain dari jarak waktu mereka dengan yang lebih dekat, juga karena isu-isu yang berkembang dan dihadapi KH Hasyim Asy'ari lebih terakomodir pada ulama-ulama abad pertengahan. Muhibbin, *Pemikiran....*, 255-256



Kajian yang bersifat perbandingan dilakukan oleh Amiq. Ia memfokuskan kepada perbedaan fatwa jihad menurut KH Hasyim Asy'ari dan Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Alawi, juga dikenal dengan sebutan Sayyid Usman al-Batawi, karena ia lahir dan juga meninggal di Betawi (Jakarta).<sup>50</sup> KH Hasyim Asy'ari, menjelang perang revolusi, telah mengeluarkan fatwa jihad yang mewajibkan umat Islam untuk berjuang melawan Belanda yang bermaksud untuk menjajah kembali bangsa Indonesia. Fatwa ini ternyata berlawanan dengan fatwa Sayyid Usman, yang mengatakan bahwa perang melawan Belanda adalah haram hukumnya.<sup>51</sup> Menurut penelitian Amiq, hal itu dikarenakan Sayyid Usman telah menerima imbalan materi dari Snouch Hurgrounje yang menyebabkan dasar pemikirannya tidak lagi genuin, tetapi terperjara imbalan yang telah ia terima.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ia lahir pada tahun 1822 di Jakarta dan meninggal tahun 1914 juga di Jakarta.

<sup>51</sup> Sayyid Usman tidak langsung berdebat dengan KH Hasyim Asy'ari dalam masalah perang melawan Belanda, karena ia sudah meninggal jauh hari sebelumnya, yakni pada tahun 1914. Namun, fatwanya yang ditujukan kepada para pejuang di Cilegon yang memberontak kepada Kolonial Belanda, lebih dikenal dengan istilah "Pemberontakan Petani Banten" sangat keras dan kasar. Secara umum diketahui bahwa mereka para pejuang itu adalah orang-orang Islam, bahkan pemimpinnya adalah tokoh tarekat. Dalam hal ini Usman menuduh, dengan menunjuk kepada para pengikut tarekat Qadiriyyah Naqsabandiyah dalam pemberontakan Banten dan para ulama, sebagai tindakan yang salah, bahkan dia mengatakan bahwa jihad tersebut adalah *ghurur* (delusi) dari ajaran agama Islam yang benar, serta menuduh mereka sebagai pengikut setan. Jajat Burhanudin, *Ulama Kekuasaan; Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia* (Jakarta: Mizan Publika, 2012), 180-185.

<sup>52</sup> Usman diyakini telah kenal dengan Snouch Horgrounje semenjak ia belajar di Mekkah. Kedekatan ini dimanfaatkan oleh Snouch untuk kepentingan penjajah dengan mengajak Usman untuk selalu membela Penjajah Belanda. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Bizawie. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan hal itu dikemukakan oleh Usman karena ia berfikir akan keselamatan komunitas Arab, yang pada waktu itu juga terancam oleh Penjajah Belanda, sehingga ia seakan-akan memusuhi umat Islam yang memberontak. Wawancara di Ciputat, 16 Juni 2015. Suminto sendiri mengakui sulitnya kedudukan Sayyid Usman yang harus berdiri di atas dua kepentingan. Namun sebagai catatan, bahwa ia telah berhasil memperoleh Bintang Salib Singa Belanda, atas pengabdianya



Selanjutnya, Zamakhsari Dhafier membahas tentang teologi ahl al-sunnah wa al-jama>'ah yang berkembang dengan sangat baik di pesantren yang mana KH Hasyim Asy'ari adalah di antara tokoh yang konsen mengembangkannya. Di samping itu, menurut Dhafier, ia adalah tipologi ulama yang sangat konsisten menjaga tradisionalisme Islam melalui pondok pesantren yang didirikannya. Teologi dan tradisionalisme Islam tersebut ditumbuh-kembangkannya dalam tradisi pesantren. Sementara Turmudzi, Mas'ud, dan Mardiyah dengan tema yang berbeda menekankan pada kepemimpinan kiai. Kalau Mas'ud menekankan pada genre pemikiran kiai, maka Mardiyah menekankan pada budaya organisasi di pondok pesantren, yang mana kiai sebagai aktor utamanya. Pondok Pesantren Tebuireng, selain Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Pesantren Lirboyo Kediri, adalah situs-situs yang ditelitinya. Adapun Gugun mengungkap peranan NU dalam mempertahankan NKRI, utamanya masa revolusi. Peristiwa penting seperti Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh PBNU pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya dan peranan sayap militer NU dalam perang kemerdekaan ia teliti, khususnya berkaitan dengan hukum syari'ah. Oleh karena itu, KH Hasyim Asy'ari, mau tidak mau, harus juga dikaji.

Kajian yang penulis lakukan dalam penelitian ini mempunyai perbedaan dengan tema-tema di atas. Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian tentang sejarah sikap seorang kiai, KH Hasyim Asy'ari, dalam menghadapi penjajahan dalam rentang waktu yang sangat panjang; penjajah Belanda hingga Jepang yang dimulai dari awal Abad XX M hingga 1947 M. Kolonial Belanda mempunyai kebijakan sendiri dalam menerapkan politiknya di Indonesia yang dapat menguntungkan dirinya atau melanggengkan kekuasaannya, demikian pula Jepang. Beragamnya politik dan kebijakan yang dilakukan oleh

---

kepada pemerintah kolonial, yang diserahkan oleh Residen Batavia pada tanggal 5 Desember 1899, tanpa suatu upacara. Suminto, *Politik Islam....*, 233-234.

negara penjajah di Indonesia, menyebabkannya berbeda pula dalam menghadapinya. Dasar-dasar pertimbangan dan tujuan yang hendak dicapai oleh KH Hasyim Asy'ari dengan mengambil sikap non-kooperatif terhadap Kolonial Belanda dan kooperatif terhadap pemerintahan Dai Nippon adalah kajian menarik. Hal-hal di seputar inilah yang penulis teliti, dan sejauh yang penulis ketahui, kajian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam sub-bab ini, akan dibicarakan beberapa hal penting, seperti Teori Aksi yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, Teori Identitas Sosial oleh Tajfel, pengertian kooperatif dan non-kooperatif, dan kiai serta ulama menurut Horikosi dan Pijper, dengan menggunakan pendekatan biografis dan sosiologis.

### **1. Teori Aksi dan Teori Identitas Sosial**

Teori Aksi dan Teori Identitas Sosial pada dasarnya berada pada naungan ilmu sosiologi. Namun dalam membaca sejarah sosial semacam kajian yang peneliti lakukan ini, bantuan ilmu sosial akan membuat penelitian ini menghasilkan bacaan yang lebih baik. Teori Aksi digunakan untuk membaca semua tindakan dan fatwa KH Hasyim Asy'ari berkenaan dengan sikap non-kooperatif dan kooperatifnya terhadap Kolonial Belanda dan Penjajah Jepang. Sedang Teori Identitas Sosial dirasa tepat untuk membaca fatwanya yang berkenaan dengan *tasabbuh* terhadap Kolonial Belanda.

Teori Aksi mengatakan bahwa aktor mempunyai kemampuan untuk memilih tindakan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan berdasar kreativitas dan proses penghayatan diri individu. Kata aksi (*action*), secara tidak langsung menyatakan adanya aktivitas, kreativitas, dan

proses penghayatan diri individu.<sup>53</sup> Parsons membedakan istilah “aksi” (*actions*) dengan istilah “*behavior*”, yang mempunyai arti tindakan yang berkesesuaian secara mekanik antar prilaku (*respons*) dengan rangsangan dari luar, respons dari situasi di luar diri. Karenanya, Parsons mengatakan teorinya dengan istilah “Teori Aksi” bukan “Teori Behavior”.<sup>54</sup> Teori Parsons sepintas mempunyai kesesuaian dengan Teori Tindakan-nya Weber, hal ini dapat dimaklumi karena teori Parsons sesungguhnya adalah pengembangan dari teorinya Weber.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengatahuan Berparadigma Ganda*, terj.Oleh Alimandan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 48-49.

<sup>54</sup>*Ibid.*,

<sup>55</sup>Tindakan Rasional Max Weber (1904). Pada Teori ini, Weber mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar. Dua tindakan dikategorikan sebagai tindakan rasional dan dua lainnya di kategorikan sebagai tindakan non-rasional. Empat tipe tindakan tersebut adalah: 1) Rasionalitas Instrumental (*Zwerk Rational*), adalah tindakan dengan tingkat rasionalitas paling tinggi. Dalam tindakan ini, tujuan yang hendak dicapai dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan menjadi pertimbangan. Artinya, tindakan ini adalah tindakan sosial yang dilakukan seseorang berdasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Karenanya, *Zwerk Rational* ini juga disebut dengan *Rasionalitas Sarana-Tujuan*. 2) Rasionalitas Nilai (*Werk Rational Action*), adalah tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran (rasional) akan nilai perilaku-perilaku etis, estetis, religius, atau bentuk prilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya.<sup>55</sup> Dalam tindakan ini yang menjadi pertimbangan dari seorang individu adalah cara yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam tindakan ini telah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai budaya dan agama bisa juga nilai-nilai lain yang menjadi keyakinan disetiap individu masyarakat. Tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai adalah tindakan sosial yang hampir sama dengan tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan didasari oleh pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya adalah terletak pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan itu. 3) *Affectual Action* (Tindakan Afektif), adalah suatu bentuk tindakan yang didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa adanya refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu atau aktor. 4) *Traditional Action* (Tindakan Tradisional), merupakan tindakan yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. Dalam tindakan jenis ini, aktor

Untuk lebih memperjelas teorinya, Parsons menyusun skema unit-unit tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut: 1) adanya individu selaku aktor, 2) aktor dipandang bertindak untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu, 3) aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai tujuannya, 4) aktor menghadapi sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, yang sebagiannya tidak dapat dikendalikan oleh individu, misalnya kelamin dan tradisi, 5) aktor berada di bawah kendali dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak lain yang mempengaruhi dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. semisal kendala kebudayaan.<sup>56</sup>

Menurut Parsons, aktor bertindak untuk mengejar tujuan, yang mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Norma-norma tersebut tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi semua ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih alternatif yang ada. Kemampuan inilah yang disebut oleh Parsons sebagai *voluntarisme*. Tegasnya, *voluntarisme* adalah kemampuan individu dalam melakukan tindakan dalam arti memilih dan menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan.<sup>57</sup>

Teori Aksi Parsons ini peneliti gunakan untuk membaca sikap dan tindakan yang dilakukan oleh KH Hasyim Asy'ari terhadap Kolonial Belanda dan Jepang. Sebagai tokoh

---

memperlihatkan perilaku yang biasa dan telah lazim dilakukan oleh nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan. Kedua tipe tindakan yang terakhir dikategorikan sebagai tindakan yang non-rasional, karena terjadi secara otomatis akibat adanya rangsangan dari luar, karena itu, perencanaan tidak menjadi landasannya. George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2001), 126.

<sup>56</sup>Ritzer, *Sosiologi Ilmu...*, 49.

<sup>57</sup>*Ibid.*

masyarakat, kiai, dan pemimpin dari organisasi besar, ia dituntut untuk mampu bersikap, yang dengan itu masyarakat, para santri, dan anggota organisasi yang berada dalam kendalinya dapat menirunya. Selain itu, sikap yang dilakukan haruslah mempunyai tujuan yang jelas dan mulia. Dalam konteks inilah, peneliti membaca sikap yang ia lakukan, apakah sikapnya keluar dari kreativitas dan perenungan diri, atau hanya sekedar reaksi dari situasi yang terjadi di luar dirinya. Maksudnya adalah apakah karena penjajah bersikap sewenang-wenang, mendlalimi, dan mengeksploitasi rakyat lantas membuat dirinya terpancing dan timbullah rasa amarah, lalu mengambil sikap memusuhi penjajah, atau karena nenek moyangnya adalah para pejuang melawan penjajah dalam Perang Diponegoro, yang lantas membuat dirinya bersikap sebagaimana nenek moyangnya, bermusuhan dengan Belanda? Sebaliknya, pada masa Jepang, apakah sikap terhadapnya ia lakukan karena dorongan situasi yang terjadi di luar kendali dirinya, atau memang suatu tindakan rasional yang telah ia renungkan dan mempunyai tujuan tertentu. Hal-hal inilah yang penting diteliti melalui Teori Aksi.

Sementara itu, Teori Identitas menyebutkan bahwa individu atau seseorang tidak dianggap sebagai individu atau seorang dengan dirinya sendiri secara mutlak dalam kehidupannya, ia merupakan bagian dari kelompok tertentu.<sup>58</sup> Oleh karena itu, Henri Tajfel, sebagaimana yang ditulis oleh Micheil A. Hogg dan Dominic Abrams, mendefinisikan identitas dengan pengetahuan individu di mana ia merasa sebagai bagian anggota kelompok yang memiliki kesamaan emosi dan nilai.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Meykel Verkuyten, *The Sosial Psychology of Ethnic Identity* (Ney York: Psychology Press, 2005), 42.

<sup>59</sup>Michael A Hogg and Dominic Abrams, *Sosial Identification* (New York : Roudledge, 1998), 7

Menurut teori ini bahwa seorang individu yang memiliki identitas sosial positif atau ia anggap positif, perilaku dan tindakannya akan sejalan dengan norma kelompoknya tersebut. Artinya, seseorang yang di-identifikasikan dirinya dengan suatu kelompok tertentu, maka perilakunya harus dan akan selalu sesuai dengan tindakan dan perilaku kelompoknya tersebut.<sup>60</sup> Dalam konteks ini, seorang Pribumi Muslim yang berperilaku dan bergaya serta berpakaian meniru penjajah, maka dapat dikategorikan ke dalam golongan mereka, dan itu hukumnya haram.

## 2. Kooperatif dan Non-Kooperatif

Istilah kooperatif dapat diartikan dengan “bersifat kerja sama, atau bersedia membantu”.<sup>61</sup> Sedangkan istilah non-kooperatif diambil dari dua kata; non dan kooperatif, “non” berarti bukan atau tidak.<sup>62</sup> Jadi istilah kooperatif dapat diartikan dengan bertindak bersama-sama, bergabung bersama dari upaya individu untuk akhir yang lebih umum dan istilah non-kooperatif dapat diartikan dengan tidak bersifat kerjasama atau tidak bekerjasama.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.* Dalam konteks ini, sama persis dengan makna hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa *man tasyabbaha bi qaum fahuwa minhum*.

<sup>61</sup> Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Polpuler* (Jakarta: Pustaka pelajar, 2012), 336 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. kbbi.web.id/kooperatif.

<sup>62</sup> WJS. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 678

<sup>63</sup> Sungguhpun tidak sama persis, istilah kooperasi mempunyai arti yang dekat dengan istilah koalisi, yang berarti; “kerjasama yang bersifat temporer antar individu yang berbeda, kelompok, atau partai politik untuk mencapai tujuan bersama, yang dapat dilakukan dalam waktu yang pendek atau waktu yang lama”. Bertrand Badie et al (ed), *Internatipnal Encyclopedia of Political Science* (California: SAGE Publications, 2011), 286-288. Di samping digunakan dalam ilmu sosial, istilah kooperatif atau non-kooperatif juga digunakan dalam ilmu ekonomi. Dalam kajian ini (ekonomi), kooperasi (kooperatif) diartikan dengan; “asosiasi orang yang bekerja sama dalam memproduksi dan mendistribusikan barang-barang William Outhwaite (ed), *Eksiklopedi Pemikiran Sosial Modern* (Jakarta: Putra Grafika, 2008), 152-153.

Kalau dilacak lebih jauh, istilah "kerjasama/*cooperation*" pertama kali muncul pada Abad XIV M atau XV M. Berasal dari kata *cooperatio* yang berarti "usaha bersama". Istilah *cooperation* terdiri dari dua kata; yaitu *co*, berasal dari kata *cum*, yang berarti "dengan" atau "bersama-sama", dan *operare*, yang berarti "untuk bertindak".<sup>64</sup>

Secara garis besar, kooperatif atau kerjasama mengacu pada setiap jenis kerja kolaboratif antara individu atau kelompok, baik secara sukarela atau sebaliknya. Istilah ini juga sering digunakan dalam literatur sosiologi, ekonomi dan manajemen, khususnya di bidang tenaga kerja, organisasi, dan perusahaan. Gagasan kerjasama ini sangat relevan ketika berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan bentuk kerja kolektif. Pengertian dari istilah sebagaimana di atas, sejauh ini, adalah yang paling banyak digunakan. Komunikasi, kolaborasi, koordinasi, partisipasi, mediasi, interaksi, dan tindakan kolektif adalah istilah klasik dalam sosiologi yang menggunakan, sungguhpun secara implisit, arti dan gagasan kooperatif.<sup>65</sup>

### 3. Kiai dan Ulama

Dalam negara dengan masyarakat yang agamis seperti Indonesia, ahli agama adalah posisi penting dalam masyarakat. Ahli agama ini, menurut Horikosi, dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu kiai dan ulama. Kiai adalah ahli agama yang berada di luar struktur pemerintahan dan kharismatik, berperan membentengi umat dan cita-cita Islam dari ancaman pengaruh sekuler dari luar. Sifat khas dari kiai adalah terus terang dalam berbicara, berani, dan blak-blakan dalam bersikap. Kiai hidup tidak dalam aturan apapun, ia

---

<sup>64</sup> Jean-Francois Drapewri, "From Cooperative Theory to Cooperative Practice" dalam <http://www.recma.org/sites/default/files/pdf.,2> (diakses pada 12 Januari 1917).

<sup>65</sup> <http://conundrumism.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-task-mengolah-informasi-tentang.html>.

adalah orang bebas, karenanya kegiatannya dinamis, lentur, dan bersifat perubahan.<sup>66</sup> Para kiai pondok pesantren, dapat dikategorikan ke dalam kelompok ini. Mereka dalam memaknai resistensinya dan ketidak-senangannya untuk berkompromi dengan penjajah, berusaha untuk mendirikan pondok pesantren di wilayah pedalaman, jauh dari wilayah kota. Menurut Suminto, sikap konfrontasi kaum santri dengan pemerintah kolonial bisa dilacak pada letak pesantren di Jawa pada waktu penjajahan, yang kebanyakan terletak di pinggir kota atau bahkan di luar kota, di desa atau pedalaman.<sup>67</sup> Dengan meletakkan pondok di pedalaman, maka secara fisik ia akan terpisah dan jauh dari jangkauan penjajah.

Ahli agama golongan kedua, yaitu golongan yang kooperatif dengan penjajah, mereka adalah pegawai tinggi dalam soal agama, menurut Pijper disebut dengan “penghulu”,<sup>68</sup> dan menurut Horikosi disebut dengan “ulama”.<sup>69</sup> Penghulu adalah pegawai pemerintah Hindia Belanda yang mengurus masalah agama, termasuk dalam hal ini adalah pengadilan agama.<sup>70</sup> Sedang Ulama adalah pejabat keagamaan atau fungsionaris agama. Ia menjabat urusan agama pada pranata keulamaan Islam.<sup>71</sup> Dengan demikian, penghulu dan ulama adalah orang-orang atau ahli agama yang berada dalam sistem pemerintahan, dan dalam konteks sikapnya terhadap penjajah, mereka adalah orang yang kooperatif dengan penguasa atau pemerintahan penjajah.

Menurut Pijper, para tokoh agama, dalam sejarah hubungannya dengan penjajah Belanda, dapat dibagi menjadi dua golongan; golongan yang tidak mau bekerjasama atau

---

<sup>66</sup> Hiroko Horikosi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), 1-2

<sup>67</sup> Suminto, *Politik Islam...*, 49-50.

<sup>68</sup> Pijper, *Beberapa Studi...*, 72.

<sup>69</sup> Horikosi, *Kyai...*, 1-2

<sup>70</sup> Pijper, *Beberapa Studi...*, 72-73.

<sup>71</sup> Horikosi, *Kyai dan Perubahan Sosial...*, 1-3.



non-kooperatif dengan pemerintah kolonial dan golongan yang bekerjasama atau kooperatif dengan pemerintah kolonial. Menurut Pijper, golongan yang pertama disebut dengan istilah “guru agama swasta”, dan yang kedua disebut dengan “penghulu”.<sup>72</sup> Menurut sifat dan karakteristiknya, guru agama swasta ini lazim disebut dengan kiai, yaitu ahli agama Islam yang aktifitas kesehariannya dihabiskan dengan mengajar agama Islam kepada para murid atau santrinya, yang biasanya dilakukan di rumah, langgar, masjid desa, atau pesantrennya.<sup>73</sup> Menurut kaum Muslim yang taat beragama, kiai atau guru agama swasta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada penghulu, sungguhpun terdapat juga penghulu yang pandai. Pada kedua golongan ini, terkadang terjadi ketegangan, karena bagi golongan kiai, penghulu adalah orang yang dianggap telah berbuat salah oleh sebab keterlibatannya di dalam pemerintahan orang kafir.<sup>74</sup>

KH Hasyim Asy’ari dapat dikategorikan ke dalam golongan kiai, baik menurut Horikosi maupun Pijper, baik pada masa Penjajah Belanda maupun Jepang, khususnya saat ia menjadi ulama bebas dan tidak berada pada pemerintah penjajah. Terkadang ia bersikap kooperatif terhadap Kolonial Belanda, dan terkadang bersikap non-kooperatif dan sangat kritis, bahkan menurutnya, haram hukumnya bekerjasama dengan Belanda dalam bentuk apapun.<sup>75</sup> Ini berbeda dengan

---

<sup>72</sup>Pada dasarnya Pijper membagi golongan ahli agama menjadi tiga; guru agama swasta, penghulu, dan pegawai agama rendah. Namun pegawai agama rendah sejatinya adalah kepanjangan tangan dari penghulu, yang bertugas di tingkat pemerintahan desa. G.F. Pijper, *Beberapa Studi...*, 72

<sup>73</sup>Guru agama swasta atau kiai ini dapat dibedakan menjadi dua; guru al-Qur’an dan guru kitab. Guru al-Qur’an adalah kiai yang mengajarkan al-Qur’an kepada para santri atau murid pada pengajaran tingkat dasar. Sedangkan guru kitab adalah kiai yang mengajar para santri atau murid pada tingkat lanjutan yang lebih tinggi dengan menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab. *Ibid.*

<sup>74</sup>*Ibid.*, 72

<sup>75</sup>Muhammad Asad Syihab, *Hadratussyaiikh Muhammad Hasyim Asy’ari, perintis Kemerdekaan Indonesia*, alih bahasa KH A. Mustofa Bisri (Yogyakarta: Titian Ilahi Press dan Kurnia Kalam Semesta, 1994), 30.

sikap para tokoh pergerakan yang pada pertengahan tahun 1933-an, karena satu dan lain hal, hampir semuanya telah merubah haluan untuk bersikap kooperatif dengan Belanda.

Pada masa Penjajahan Jepang, KH Hasyim Asy'ari juga bersifat bebas sebelum diberi tugas memimpin *Shumubu*. Fatwanya yang mengharamkan *seikeire* ia lakukan saat awal penjajah Jepang, dan tentu saat ia belum terlibat di dalam *Shumubu*. Setelah memimpin lembaga agama buatan Jepang ini, ia dapat dikategorikan ke dalam golongan “ulama”, menurut Horikoshi, atau penghulu menurut Pijper. Kesediaannya untuk menduduki kepala *Shumubu*, Ketua Besar Masyumi,<sup>76</sup> Penasehat Utama pada *Jawa Hokoo Kai*, adalah contoh bahwa dirinya berada dalam sistem pemerintahan yang ada, dan itu berarti kooperatif terhadap pemerintahan Dai Nippon.

Kooperatif atau non-kooperatif adalah sebuah strategi dalam perjuangan. Strategi dalam perjuangan sangat penting dan dapat silih berganti, asal tujuan utama tidak bergeser. Pada masa penjajahan, para tokoh bangsa harus cerdik dalam memposisikan dirinya dalam perjuangan, agar mendapatkan hasil maksimal.

## G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan ilmu sosial. Pemakaian ilmu sosial dimaksud untuk dapat membantu memahami peristiwa yang terjadi secara sinkronik. Selanjutnya Louis Gottschalk membagi empat tahapan pokok dalam penelitian sejarah, yaitu, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.<sup>77</sup> Penjabaran dari empat tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>76</sup>Ricklefs, *Sejarah Indonesia...*, 309

<sup>77</sup>Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notokusanto (Jakarta: UI Press, 2008), 23-24.

## 1. *Heuristik*

Yang dimaksud dengan *heuristik* yaitu pengumpulan data-data dari berbagai macam sumber yang terkait dengan topik.<sup>78</sup> Sumber sejarah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena apabila tidak ada sumber, maka tidak ada penjelasan sejarah. Ini sejalan dengan ungkapan Kuntowijoyo bahwa sumber adalah data sejarah itu sendiri.<sup>79</sup> Sumber sejarah, dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam; yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>80</sup> Sumber primer adalah kesaksian se-zaman dengan peristiwa yang terjadi, atau saksi pandangan mata,<sup>81</sup> sumber-sumber tersebut tidak harus asli,<sup>82</sup> cukup bahwa kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain, melainkan berasal dari tangan pertama.<sup>83</sup> Dalam konteks penelitian ini, sumber primer mengacu pada

---

<sup>78</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 1995), 95

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 83.

<sup>81</sup>Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra lain atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (saksi pandangan mata), karena itu sumber primer dihasilkan dari orang-orang yang sezaman dengan peristiwa. Adapun sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. Gottschalk, *Mengerti Sejarah...*, 42.

<sup>82</sup>Kata 'Asli' mempunyai lima arti yang berbeda dari suatu dokumen. Suatu dokumen dapat disebut asli apabila; pertama, mengandung gagasan yang segar dan kreatif; kedua, tidak diterjemahkan dari bahasa yang dipergunakan untuk menuliskannya; ketiga, berada dalam tahapan yang paling awal dan belum diupam; keempat, teksnya merupakan teks yang disetujui, yang tidak diubah atau diganti, dan kelima, merupakan sumber yang paling awal yang didapat mengenai informasi yang dikandungnya. Namun demikian, mengenai sumber asli dipakai oleh sejarawan dalam dua arti: pertama, untuk mendeskripsikan suatu sumber yang tidak disalin atau diterjemahkan, sebagaimana keluar dari tangan pertama; kedua, suatu sumber yang memberikan informasi paling awal yang dapat diperoleh mengenai persoalan yang sedang dibahas, karena sumber-sumber yang lebih awal telah hilang. *Ibid.*, 43.

<sup>83</sup>*Ibid.*, 44.

dokumen,<sup>84</sup> naskah-naskah,<sup>85</sup> dan tulisan sezaman atau yang paling dekat dengan masa yang menjadi fokus kajian, termasuk dalam hal ini adalah buku yang ditulis oleh orang yang turut melakukan perjuangan masa itu. Buku-buku karangan KH Hasyim Asy'ari, *Suara NO*, Verslag Kongres-kongres NU, *Harian Umum Kedaulatan Rakyat* edisi Oktober dan Nopember 1945, bulletin Masyumi *Soeara Moeslimin* yang terbit antara tahun 1943-1945, serta lainnya menjadi sumber primer.

Sejatinya penelitian sejarah merujuk kepada sumber primer, namun, dalam beberapa kasus, apabila sumber-sumber primer tersebut tidak dapat ditemukan, sejarawan dapat mempergunakan sumber-sumber yang memberikan informasi yang paling awal mengenai tema yang sedang dibahas. Dalam hal yang demikian, sumber tersebut dapat dikatakan asli.<sup>86</sup>

Sumber sekunder adalah sumber kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yaitu seseorang yang saat terjadi suatu kejadian yang ia kisahkan, tidak hadir di situ.<sup>87</sup> Dalam penelitian ini, sumber-sumber

---

<sup>84</sup> Dokumen diambil dari kata *docere*, yang berarti mengajar. Sejarawan menggunakan dalam banyak arti, seperti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan juga benda-benda visual seperti *artifact*, yakni peninggalan-peninggalan visual dan petilasan-petilasan arkeologis. Kadang juga diperuntukkan untuk surat-surat resmi dan surat-surat tanah air. Dengan demikian, pengertian dokumen adalah sinonim dengan sumber. *Ibid.*, 45-46.

<sup>85</sup> Naskah dimaksud satu peninggalan masa lampau dalam bentuk tulisan dengan menggunakan piranti tradisional (alat tulis, aksara, bahasa, dan model penulisan). Karsono H. Saputro, *Percik-Percik Bahasa dan Sastra Jawa* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2005), 14. Dalam literature Islam klasik dikenal dengan *makhtu>t/a>t*, adalah karya dalam bentuk buku yang ditulis dengan tangan (manuskrip) sebelum kemudian berbentuk buku yang dicetak dengan teknologi Barat. S.O. Robson, *Principle of Indonesian Philology* (Lieden: Rijksuniversiteit te Lieden & Compliments of The Departement of Languages and Cultures of South East Asia and Oceanea, 1989), 1.

<sup>86</sup> Gottschalk, *Mengerti Sejarah...*, 44., dan Aam Abdillah, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 98

<sup>87</sup> Gottschalk, *Mengerti Sejarah...*, 43

sekunder tidak dapat dihindarkan, utamanya masa Penjajahan Jepang yang terkenal represif terhadap media massa, sehingga tidak banyak media massa yang bertahan. Dalam kaitan ini, pengambilan data dari sumber-sumber yang tergolong skunder, baik sumber tertulis maupun sumber lisan, menjadi keniscayaan. Sumber lisan diperoleh dari wawancara dengan keluarga, dalam konteks ini adalah para cucunya dan santrinya yang masih hidup.

Sementara itu, sumber-sumber tertulis didapat dari buku-buku tentang riwayat hidupnya, yang hampir semuanya ditulis setelah kewafatannya. Tercatat buku karangan Akarhanaf yang berjudul *KH Hasyim Asy'ari, Bapak Umat Islam Indonesia*, adalah buku pertama yang ditulis tentangnya, ditulis pada tahun 1949 oleh puteranya sendiri "Abdul Karim". Setelah itu, apabila membicarakan tentang dirinya, hampir pasti merujuk kepada buku tulisan Akarhanaf itu. Buku tersebut, kalau dikaitkan dengan sumber primer atau sekunder tentu masuk ke dalam kriteria ke dua. Namun karena mempunyai rujukan tahun yang tidak jauh berbeda dengan kehidupannya, dan apalagi ditulis oleh anaknya sendiri, maka bisa dikategorikan ke dalam sumber yang sangat penting.

Buku lain yang juga sangat penting adalah buku yang berjudul *al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari; Wa>dhi'u Labinati Istiqla>li Indonesia*,<sup>88</sup> ditulis oleh Muhammad Asad Syihab, juga buku-buku karangan Saifuddin Zuhri, terutama yang berjudul; *Berangkat Dari Pesantren*,<sup>89</sup> *Guruku Orang-orang dari Pesantren*,<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Buku ini berbahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh KH Musthofa Bisri. Ditulis oleh Muhammad Asad Syihab, orang yang sebagian hidupnya menjumpai KH Hasyim Asy'ari, bahkan ia sempatkan untuk datang ke KH Hasyim Asy'ari untuk mengetahui dirinya dari dekat. Terbit pertama kali di Libanon pada tahun 1970.

<sup>89</sup>Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren* (Jakarta: Gunung Agung, 1987).

*Vandemekum*, dan *Kaleidoskop Politik di Indonesia*.<sup>91</sup> Dua orang ini, Syihab dan Zuhri pernah bertemu langsung dengan KH Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng.

Selanjutnya tulisan Aqib Suminto berjudul: *Politik Islam Hindia Belanda*.<sup>92</sup> Buku ini menerangkan tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah kolonial dalam menghadapi pribumi. Karena hampir semua pribumi beragama Islam, maka kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap pribumi disebut dengan Politik Islam Hindia Belanda. Buku tulisan Harry F. Benda yang berjudul: *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*,<sup>93</sup> adalah buku lainnya yang juga sangat penting yang menerangkan pola hubungan dan permasalahan yang terjadi antar kaum Muslim dan Pemerintah Militer Jepang. Selanjutnya, yang tidak kalah nilainya adalah tulisan Deliar Noer yang berjudul *Gerakan Modern Islam di Indonesia*.<sup>94</sup> Buku-buku tersebut memberikan sangat banyak informasi tentang hubungan umat Islam dengan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Militer Jepang.

Sumber-sumber tersebut, baik yang primer maupun sekunder, didapat dan dikumpulkan dari berbagai macam tempat dan perpustakaan, seperti Perpustakaan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Perpustakaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta, Arsip Nasional (ANRI) Jakarta, Perpustakaan

<sup>90</sup>Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-orang dari Pesantren* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1977).

<sup>91</sup>Buku ini merekam pergolakan yang terjadi pada masa Jepang. sebagai orang yang aktif di Ansor NU dan sangat dekat dengan Kiai Wahid Hasyim, ia mempunyai pengalaman yang sangat banyak, khususnya yang terjadi di dunia pesantren pada masa Jepang. Saifuddin Zuhri, *Kaleidoskop Politik di Indonesia* (Jakarta: Gunung Jati, 1983).

<sup>92</sup>Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996).

<sup>93</sup>Harry F. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).

<sup>94</sup>Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996).

Lakpesdam NU Jakarta, Perpustakaan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Museum NU “Astranawa” Surabaya, Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan Daerah Sidoarjo, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Ignatius College Yogyakarta, dan perpustakaan-perpustakaan yang berada di beberapa pondok pesantren, perguruan tinggi atau lain yang mempunyai data tersebut.

## 2. Kritik (Verifikasi) Sumber

Tahapan kedua ini cukup penting dalam rangka menguji validitas dan realibilitas data yang sudah terkumpul. Terdapat dua kritik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal berfungsi menguji otentisitas atau keaslian suatu sumber.<sup>95</sup> Sedangkan kritik internal berfungsi menguji kredibilitas makna yang ada pada sumber.<sup>96</sup> Kritik internal dilakukan dengan menguji apakah suatu dokumen mempunyai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Menurut Hasan Usman, kritik ini sangat diperlukan agar peneliti sejarah tidak mengambil begitu saja informasi sebelum ia memperoleh kepastian tentang kebenarannya.<sup>97</sup>

Buku-buku karangan KH Hasyim Asy’ari, majalah, atau buletin yang diterbitkan oleh NU, catatan rapat-rapat atau muktamar NU, juga beberapa media massa yang terbit saat itu, seperti *Kedaulatan Rakyat*, *Soeara Moeslimin*, dijadikan bukti kredibilitas dokumen tentang pemikiran-pemikirannya. Data-data tersebut dikroscek dengan data-data lain. Kesesuaian data menandakan data tersebut valid, namun

---

<sup>95</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu...*, 99.

<sup>96</sup>*Ibid.*, 99-100

<sup>97</sup>Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, terjemahan oleh Tim Penerjemah Depag RI (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986), 122



apabila terdapat ketidak-sesuaian, maka data primer atau tulisan sezaman lebih diutamakan. Dengan kritik ini, maka data-data historis faktual bisa didapat.

### 3. Interpretasi

Tahapan selanjutnya adalah melakukan *interpretasi*, yaitu memberikan makna terhadap fakta sejarah yang ditemukan, suatu tahapan yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati.<sup>98</sup> Dalam penelitian ini *interpretasi* dilakukan bersamaan dengan analisis. Di dalam analisis ini diperlukan teori-teori dari berbagai keilmuan yang terkait dengan temuan, seperti teori identitas sosial dan teori-teori dari ilmu sosial lainnya. Interpretasi diperlukan agar tercipta penggalan peristiwa dari beberapa fakta yang ditemukan sebelumnya.

Sebagai contoh adalah sebagai berikut; dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua *Shumubu*, KH Hasyim Asy'ari mewakili pelaksanaannya kepada anaknya, Kiai Wahid, sedang dirinya tetap berada di Tebuireng mengajar santri-santrinya. Ketidak-sediaannya untuk memegang langsung kendali *Shumubu*, dapat ditafsirkan sebagai suatu penolakan halus terhadap pemerintahan Jepang yang mengangkatnya sebagai ketua. Maka tidak salah kalau kebijakannya itu ditafsirkan sebagai perlawanan secara diam-diam. Perlawanan terhadap Pemerintahan Balatentara Jepang, saat itu, memang tidak mungkin dilakukan secara terang-terangan. Dengan demikian, tindakan KH Hasyim Asy'ari yang mewakili pelaksanaan tugasnya kepada anaknya, sangat terbuka untuk ditafsirkan, dan itu dimungkinkan dalam ilmu sejarah.

---

<sup>98</sup>Hal ini karena di tahapan ini, subjektifitas penulis sejarah seringkali terbawa apabila tidak dilakukan dengan benar dan hati-hati. Bagaimanapun, penulisan sejarah dilakukan untuk mendekatkan kepada kebenaran (objektifitas) dan menjauhkan dari bias dan prasangka (subjektifitas). Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu...*,16



#### 4. Historiografi

Tahapan akhirnya adalah historiografi atau penulisan sejarah, biasa disebut dengan rekontruksi sejarah.<sup>99</sup> Model penulisan sejarah ini memang tidak utuh, yaitu kehidupan KH Hasyim Asy'ari antara tahun 1905-1947 tanpa jeda, karena data yang didapat tidak runtut setiap saat. Beberapa kejadian hanya ada pada moment-moment tertentu, paling tidak, itu yang dapat penulis temukan dalam penelitian ini. Tindakan dan fatwa-fatwanya yang terjadi dalam moment-moment tertentu dan dalam rentang waktu yang cukup lama, hampir setengah abad tersebut, direkontruksi sehingga menjadi sejarah yang utuh. Moment-moment tersebut, yang bersifat sinkronis, direkontruksi sesuai urutan kejadiannya (secara kronologis). Penulisan sejarah yang demikian, menurut Kuntowijoyo, adalah penulisan sejarah yang mengambil model diakronis-interval.<sup>100</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut;

Bab pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konteks sosial-budaya paruh pertama Abad XX M di Indonesia. Diawali dengan pembahasan tentang akhir masa kolonialisme di Indonesia, yaitu akhir masa Kolonialisme Belanda digantikan oleh penjajahan Jepang. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang munculnya faham nasionalisme di Indonesia dan berdirinya organisasi-organisasi agama di Indonesia. Dalam bab ini dibahas lebih detail tentang

---

<sup>99</sup> Gottschalk, *Mengerti Sejarah...*, 167, dan Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu...*, 54

<sup>100</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994), 39-44

istilah kooperatif dan non-kooperatif, asal mula munculnya di Indonesia dan partai-partai yang mengambil sikap kooperatif dan non-kooperatif tersebut.

Bab ke-tiga berisi tentang biografi KH Hasyim Asy'ari, semenjak kelahiran hingga wafatnya. Termasuk dalam hal ini adalah pencarian ilmu dan pengetahuan yang ia lakukan dari pesantren satu ke pesantren lainnya hingga ke Mekah al-Mukarramah. Juga aktifitasnya dalam berbagai macam organisasi. Sementara rantai intelektual dan aktivitas keilmuan seperti karya-karya ilmiah yang jumlahnya cukup banyak juga penting untuk diketengahkan.

Bab keempat berisi tentang Politik Pemerintahan Kolonial Belanda dan Sikap KH Hasyim Asy'ari terhadapnya, yaitu bentuk sikap kooperatif dan non-kooperatif, baik sebelum proklamasi kemerdekaan maupun sesudahnya. Termasuk yang di bahas dalam bab ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap yang sedemikian dari KH Hasyim Asy'ari.

Bab kelima berisi tentang Politik dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Balatentara Jepang saat menduduki Indonesia, serta sikap dan bentuk non-kooperatif dan kooperatif KH Hasyim Asy'ari terhadapnya. Faktor-faktor penyebab adanya sikap yang demikian terhadap Pemerintahan Jepang termasuk yang dibahas dalam bab ini.

Bab keenam, berisi tentang tujuan dan pengaruh dari tindakan dan fatwa KH Hasyim Asy'ari kepada Pemerintah Hindia Belanda dan Jepang, baik dari sikapnya yang kooperatif maupun non-kooperatif, yang keluar melalui fatwa dan tindakan dari dirinya sendiri maupun PBNU.

Bab ketujuh adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang perlu dan terkait dengan bahasan.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa;

1. KH Hasyim Asy'ari bersikap non-kooperatif atau kooperatif terhadap penjajah Belanda dan Jepang disebabkan adanya pelaksanaan politik dan kebijakan mereka terhadap rakyat, khususnya golongan Islam. KH Hasyim Asy'ari mengambil sikap non-kooperatif terhadap penjajah Belanda, apabila politik dan kebijakan mereka, menimbulkan keresahan, kesengsaraan, dan kerugian bagi bangsa, lebih-lebih bagi agama. Namun senyatanya mereka adalah penguasa negeri ini, maka siasat dalam berhubungan mesti dilakukan, dan bersikap kooperatif pada suatu saat tertentu tidak dapat dihindarkan. Sikapnya terhadap Jepang, selain kesalahan kebijakannya dalam masalah *Saikeire* yang sangat ia tentang, berbagai macam kebijakan yang di terapkan mempunyai potensi menguntungkan golongan Islam, dalam hal yang demikian, ia bersikap moderat dan kooperatif.
2. Dalam mengekspresikan sikap kooperatif dan non-kooperatifnya, KH Hasyim Asy'ari tidak dapat lepas dari konteks yang terjadi saat itu. Artinya bentuk ekspresi sikapnya sangat terkait dengan situasi dan kondisi. Dengan demikian, sikapnya selalu kontekstual. Dalam hal-hal yang berkenaan dengan agama, ia bersikap jelas dan tegas tetapi dalam hal-hal yang tidak terkait dengan agama, ia dapat bersikap lebih moderat. Sikap non-kooperatifnya terhadap Belanda pasca kemerdekaan, terasa lebih tegas dari pada sebelumnya, karena ancaman kepada agama dan negara lebih nyata. Bentuk sikapnya

tersebut, baik yang kooperatif maupun non-kooperatif, ia ekspresikan dalam tindakan dan fatwa-fatwanya, terkadang juga melalui keputusan PBNU. Sementara itu, pada masa Jepang, ia menentang *Seikeire* karena ketersinggungan akidah, dan sikap kooperatifnya lebih karena keselamatan dan keberlangsungan perjuangan, juga adanya kebijakan yang menguntungkan umat Islam.

3. Tujuan dan pengaruh sikap kooperatif dan non-kooperatif KH Hasim Asy'ari adalah sebagai berikut;
  - a. Tujuan sikap kooperatif terhadap Belanda disebabkan situasi mengharuskan demikian karena mereka adalah penguasa negeri. Adapun tujuan sikap non-kooperatif terhadapnya adalah menjaga agama, mempertahankan identitas budaya, harga diri bangsa, kemerdekaan, dan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Sementara itu, tujuan sikap non-kooperatif terhadap Penjajah Jepang adalah menjaga kemurnian akidah dan agama, sedang sikap kooperatif terhadapnya bertujuan untuk keselamatan, keberlangsungan, dan keberhasilan perjuangan.
  - b. Pengaruh dari sikapnya adalah sebagai berikut; sikap kooperatifnya dapat menyelamatkan kiai dan pesantren dari intaian dan kejaran Kolonial Belanda. Sementara itu pada masa Penjajah Jepang pengaruhnya terasa dengan terjadinya konsolidasi kiai dan terbentuknya organisasi semi-militer Hizbullah. Pengaruh sikap non-kooperatifnya adalah menekan kebijakan penjajah yang diskriminatif dengan tidak dijalankannya beberapa kebijakan yang meresahkan masyarakat, dan sikap non-kooperatifnya pasca kemerdekaan adalah memperkuat landasan teologis para pejuang dalam perang mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia..

Akhirnya, sebagai sebuah temuan, KH Hasyim Asy'ari membuktikan bahwa, ternyata teologi

keagamaan itu paralel dengan semangat kebangsaan, bahkan menjadi dasar nasionalisme dalam menentang penjajah. Itulah sebabnya, ia memandang bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Kewajiban membela negara sama dengan membela agama, karena negara adalah pelindung bagi praktik-praktik kegiatan keagamaan, dan menjadi tempat tumbuh kembangnya agama. Agama tidak akan mulya kalau bangsa dan negara dalam keadaan terhina atau terjajah.

## **B. Saran**

Penelitian ini secara teoritis membutuhkan penelitian lanjutan, yaitu melihat sisi lain dalam sikap KH Hasyim Asy'ari terhadap penjajah. Masih banyak sisi lain dari sekian banyak sisinya yang belum terungkap, seperti caranya membangun mental para santri yang berjumlah puluhan ribu, sehingga saat menjadi alumni mereka tetap militan anti penjajah. Dengan meneliti semua sisi dari kehidupan yang telah ia perankan, maka generasi sekarang dan yang akan datang, dapat mengambil suri tauladan dari orang yang paling berpengaruh di Indonesia, paling tidak di lingkungan para kiai dan pesantren, khususnya pada paruh pertama Abad XX.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdillah, Aam, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Abu Hamdan, Abdul Djalil, *Ahkamul Fuqaha'*, *Himpunan Masail Diniyah dalam Muktamar NU*, Kudus: Menara Kudus, n.d.
- Ahmed, Akbar S., *Living Islam, Tamasya Budaya Menyusuri Samarkand hingga Stornoway*, Terjemah oleh: Pangestuningsih, Bandung: Mizan, 1997.
- Akarhanaf, *Kiai Hasyim Asy'ari, Bapak Ummat Islam Indonesia 1871-1947*, Jombang: tp, 1949.
- Alfian, *Islamic Modernism in Indonesian Politics: The Muhammadiyah Movement during the Dutch Colonial Period, 1912-1942*, Wisconsin, University of Wisconsin, 1969.
- Ali, A. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1996.
- , “Meninjau Kembali Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Ulama” dalam majalah *Pesantren*, Jakarta: P3M, No. 2/Vol. IV/1987.
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor, *Qamus Karabiyak al-Asry*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998
- Ambari, Hasan Mua'rif, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998.
- Amiq, “Two Fatwas on Jihad against the Dutch Colonization in Indonesia: A Propagandical Approach to the Study of Fatwas”, *Studia Islamica*, 1998. vol. 5, No. 3.
- Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya, PT Duta Aksara Mulia, 2010
- Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang: Kalimasada, 1993



Asmadi, *Pelajar Pejuang*, Surabaya, tp, 1980.

Asy'ari, Hasyim, "al-Nu>r al-Mubi>n fi Mahabbah Sayyid al-Mursali>n" dalam Ishom Hadziq, *Irsyad al-Sa>ri, fi jam'I Mushannafa>t al-Syaikh Hasyim Asy'ari*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H.

\_\_\_\_\_, *Al-Risa>lah al-Musamma> bi al-Ja>su>s fi Baya>n Hukm al-Na>qu>s*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H.

\_\_\_\_\_, *al-Tibya n fi al-Nahy 'an Muqa>ta'at al-Arham wa al-Aqa>ri>b wa al-Ikhwa>n*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H.

\_\_\_\_\_, *Arba'in Hadi>tsan Tata'allaq bi Maba>di' Jam'iya>t Nahdlat al-'Ulama>'*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H.

\_\_\_\_\_, *Muqaddima>t al-Qa>nu>n al-Asa>si> li Jam'iya>t Nahdlat al-Ulama>'*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H.

\_\_\_\_\_, *Risa>lah Ahl al-Sunnah wa al-Jama>'ah fi hadi>ts al Mauta> wa Ashrat al-Sa>'ah wa Baya>n Maqhu>m al-Sunnah wa al-Bid'ah*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H.

\_\_\_\_\_, *Risa>lah fi Ta'akud al-Akhdh bi Madza>hib al-A'immah al-Arba'ah*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H.

\_\_\_\_\_, *Ziya>dat Ta'li>qa>t 'ala Manzu>mat al-Shaikh Abd Alla>h bin Ya>sin al-Fasuruani*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H.

\_\_\_\_\_, *"Mawa>iz"*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H

\_\_\_\_\_, *Tamzi>z al-Haq min al-Ba>til*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H.

Atjeh, Aboebakar, *Sejarah Hidup KH A. Wahid Hasjim*, Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2015

- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Jakarta: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos, 1999.
- Al-Ba'albaky, Munir, *al-Maurid al-Asasy*, Beirut: Dar al-ilm li al-Mala'yin, 1967.
- Badie, Bertrand, et al (ed), *International Encyclopedia of Political Science*, California: SAGE Publications, 2011.
- Bannerman, Patrick, *Islam and Perspective: A Guide to Islamic Society, Politic, and Laws*, London: tp, tth.
- Bawani, Imam, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam: Studi tentang Daya Tahan Pesantren Tradisionalisme*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Al-Bazzaz, Abdurrahman, "Islam dan Nasionalisme Arab" dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-masalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Sejarah Politik Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Berg, C.C., "Indonesian" dalam *Wither Islam*, disunting oleh H.A.R. Gibb, London, Victor Gollanca Ltd, 1932.
- Billah, MM, "Pergolakan NU & Kelompok Islam: Interplay antara "Gerakan" dengan "Gerakan Tandingan" dan "Tandingan atas Gerakan Tandingan", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 2, 1998.
- Al-Birri, Zaka'ria, *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah*, ttp: Dar al-Ittihad al-Arabi li al-Tiba'ah, 1975.
- Bizawie, Zainul Milal, *Masterpiece Islam Nusantara, Sanad dan Jejaring Ulama-Santri (1830-1945)*, Jakarta: Pustaka Compass, 2016.

- \_\_\_\_\_, *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Pustaka Compass, 2014.
- Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Bruinessen, Martin Van, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Yogyakarta: Gading Publishing, 2012.
- Burhanudin, Jajat, "Islam dan Negara-Bangsa: Melacak Akar-akar Nasionalisme Indonesia", *Studia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Ulama Kekuasaan; Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta: Mizan Publika, 2012.
- Bustami, Abdul Latif, dan Tim Sejarawan Tebuireng, *Resolusi Jihad, Perjuangan Ulama: dari Menegakkan Agama Hingga Negara*, Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2015
- Chaturvedi, M., dan B.N. Tiwardi, *A Practical Hindi-English Dictionary*, Delhi: Rashtra Printers, 1970.
- Dahm, Bernhard, *Soekarno Dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Darban, Ahmad Adaby, *Sejarah Kauman; Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah*, Yogyakarta: Tarawang, 2000.
- Dasuki, A. Hafidz, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1986.
- Denoon, Donald, "Colonialism" dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, terj. Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Dhafier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Al-Diba'I, *Maulid al-Diba'I*, Sidoarjo: SDIT an-Nafi'iyah, tth.

- Al-Din, Ali ibn (Sultan) Muhammad Abu al-Hasan Nur, *al-Asra>r al-Marfu>'ah fi al-Akhba>r al-Maudhu>'ah (al-Maudhu>a'a>t al-Kubra>)*, Beirut: Da>r al-Ama>nah/Muassasah al-Risa>lah, 2010.
- Effendi, Djohan, *A Reneval Without Breaking Tradition: The Emergence of a New Discourse in Indonesia' Nahdlatul Ulama During The Abrurrahman Wahid Era*, Yogyakarta: Interfidei, 2008.
- Encyclopedias and Dictionaries, *World Book Encyclopedia*, Chicago: a Scott Fetzer Company, 2007.
- Esposito, John L., *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Faisol, Moch., *Jejak Perjuangan Laskar Hizbullah Jombang, Biografi Pdrs. Sumadi, Prajurit TNI Batalyon 39/Condromowo Brigade XIX, Devisi I Jawa Timur* (draf buku, belum diterbitkan, dokumentasi pribadi, 2014).
- al-Fajani, Muhammad al-Syarif, *al-Siyasi al-Dini fi al-Majal al-Islami* (ttp: Librainie Aftheme Fayard, 2008
- Fatwa, Jarkom, *Sekilas Nahdlatut Tujjar*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Al-Fauzan, Ibrahim Fauzan, *Iqli>m al-Hija>z wa 'Awa>mil al-Nahdah al-Hadi>sah*, Riyadh: Matabi al-Farazdaq l-Tijariyah, 1981.
- Fealy, Greg, dan Greg Barton (ed), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Feillard, Andree, *NU vis-à-vis Negara, Pancaran Isi, Bentuk, dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Feroz, Ahmad, *The Making of Modern Turkey*, New York: tp, 1994.
- Frederick, William H., dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1982.

- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Gibb dan Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J.Brill, 1974.
- Gibb, H. A. R., *Aliran-aliran Modern Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Goto, Ken'ichi, *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 2008.
- Graff, De, dan Pegeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*, Jakarta: Grafiti Press, 1986.
- Guralnik, David B., *Websters New World Dictionary of the American Language*, New York: Warners Book, 1987.
- Guyanie, El-Gugun, *Jihad Paling Syar'i*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Hadziq, Ishomuddin, "al-Ta'rif bi al-Mu'allif" dalam KH Hasyim Asy'ari, *Adab al-Alim wa al-Muta'allim*, Jombang: Maktabah Turats al-Islami, 1415 H.
- , *Irsyad al-Sa'ri fi jam'I Mushannafat al-Syaikh Hasyim Asy'ari*, Tebuireng: al-Maktabah al-Masruriyyah, 1415 H.
- , *KH Hasyim Asy'ari, Figur Ulama dan Pejuang Sejati*, Jombang: Pustaka Warisan Islam, 1999.
- Haidar, Ali, "Nahdatul 'Ulama di Indonesia; Pendekatan Fikih Dalam Politik", *disertasi* Pada Fakultas Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1993.
- , *Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Hak, Nurul, "Perubahan Sosial Pesantren di Tasikmalaya pada Paruh Pertama abad XX (1905-1950)", Yogyakarta:

*Thesis* Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2003.

Hamka, *Ayahku*, Jakarta: Widjaya, 1958.

Hardijanto, Dwi, “Hizbullah: Laskar Pejuang yang dibuang”, *Majalah Islam Sabili*, edisi khusus Juli 2004.

Hasyim, Umar, *Riwayat Maulana Malik Ibrahim: Wali Pertama dari Walisongo*, Kudus: Menara Kudus, 1981.

Hasyim, Wahid, *Mengapa Memilih NU?, Konsepsi tentang Agama, Pendidikan, dan Politik*, Jakarta: PT Inti Sarana Aksara, 1985.

Helmy, Ario, *KH Zainul Arifin, Berdzikir Menyiasati Angin*, Jakarta: PT. Duta Aksar Mulia dan PPLTN-NU, 2009.

Hogg, Michael A, and Dominic Abrams, *Social Identification*, New York: Roudledge, 1998.

Horikosi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987.

Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age*, Cambridge: University Press, 1993.

Hourgronje, C. Snouck, *Mekka in The Later Part of the 19<sup>th</sup> Century*, Leiden: Ej. Brill, 1931.

Hoyt, Edwin P., *The Great Pacific Conflict: Japan's War*, New York: Da Capo Press, 1986.

Huda, Masyamul, *Guru Sejati Hasyim Asy'ari, Pendiri Pesantren Tebu Ireng yang mengakhiri Era Kejayaan Kebo Ireng dan Kebo Kicak*, Ttp: Pustaka Inspira, 2014.

Isnaeni, Hendri F., *Doktrin Agama Syekh Abd. Karim al-Bantani dalam Pemberontakan Petani Banten*, Jakarta: Kreasi Cendikia Pustaka, 2012.

Jailani, Asep Abdul Qadir, *al-Ta'liqat al-Wadhihat 'ala al-Tanbihat al-Wajibat wa al-'alamah Muhammad Hasyim Asy'ari, Wadhi'iu Labinati Istiqlali Indonesia*, Demak: Maktabah Turats Nusantara, 2016.

- Jad'an, Fahmi, *- al-Mihnah; Bahts fi> Jadaliyah al-Di>ni> wa al-Siy>asi> fi al-Isla<>*, Kuwait: Abu Salum al-Mu'tazili, 2000.
- Al-Jundi, Anwar, *al-Alam al-Isla>mi>wa al-Isti'ma>r al-Siya>si wa al-Tsaqa>fi*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnan 1983
- Karim, M. Abdul, *Islam Nusantara*, Yogyakarta: Gamasurya, 2007
- Kartodirdjo, Sartono, "Peristiwa dan Tokoh dari Sejarah Pergerakan Nasional" dalam *Lembaran Sejarah*, no. 2, 1968.
- \_\_\_\_\_, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), 16., dan Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- \_\_\_\_\_, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- \_\_\_\_\_, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kayyis, El-Isno, *Perjuangan Laskar Hizbullah di Jawa Timur*, Tebuireng: Pustaka Tebuireng, 2015.
- Khuluq, Lathiful, "Hasyim Asyari: Religius Thought and Political Activies 1871-1945", *Thesis Mc Gill University*, 199.
- \_\_\_\_\_, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi KH Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Kohn, Hans, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta: Erlangga, 1984
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang, 1995.

- \_\_\_\_\_, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Kurasawa, Aiko, *Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Yayasan Karti Sarana bekerja sama dengan PT. Gramedia, 1993.
- Lateif, Hasyim, *NU Penegak Panji Ahlussunah wal Jama'ah*, Surabaya: PWNNU Jawa Timur, 1979.
- Lombard, Dennys, *Nusa Jawa; Silang Budaya, Kajian Sejarah terpadu, Bagian II, Jaringan Asia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Ma'libari, al- Zain al-Di'n Abd al-'Azi'zi, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurraul 'Ain*, Bandung: Syirkah al-Ma'arif li al-Thab' wa al-Nasyr, tth.
- Machfoedz, Maksoem, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, Surabaya: Yayasan Kesatuan Ummat, 1982.
- Majid, Nurcholish, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjuangan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi; Studi Multi Kasus Pondok Modern Gontor Ponorogo, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng*, Malang, UIN Maliki Press, 2012.
- Marijan, Kacung, "Nasionalisme NU dan Politik kebangsaan" dalam Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Pustaka Compass, 2014
- Mas'ud, Abdurrahman, *Dari Haramain ke Nusantara, Jejak Intelektual Arsitek*, Jakarta: Kencana, 2006.
- \_\_\_\_\_, Abdurrahman, *Intellectual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas, 2010.



- Moedjanto, G., *Sejarah Indonesia Abad Ke-20 I, dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Muhchtarom, Zaini, *Santri Abangan di Jawa*, Jakarta: INIS, 1988.
- Muljana, Slamet, *Kesadaran Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, Jilid I dan II. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Munawwir, Imam, *Kebangkitan Islam dan Tantangan-tantangan yang dihadapi dari Masa ke Masa*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Nagazumi, Akira, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia; Budi Utomo 1908-1918*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Nata, Abudin, *Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Natsir, Moh., *Capita Selecta*, I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Niel, Robert van, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Noor, Rohinah M., *KH Hasyim Asy'ari, Memodernisasi NU dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2010.
- Notosusanto, Nugroho, dan Yusmar Basri, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Notosusanto, Nugroho, *Tentara PETA Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1979.

- Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Outhwaite, William (ed), *Eksiklopedi Pemikiran Sosial Modern*, Jakarta: Putra Grafika, 2008.
- Pijper, G.F., *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Poerbakawatja, Soegarda, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta, tp, 1970.
- Poerwadinata, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: balai Pustaka, 1976.
- Poesponegoro, Marwati Djoenoed, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional VI*, Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1993.
- Pringgodigdo, AG., *Tatanegara di Djawa pada Waktu Pendudukan Djepang: Dari Bulan Maret sampai Bulan Desember 1942*, Yogyakarta: tp, 1952.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1975
- Rahman, Jaluddin Abd., *al-Maslahah al-Mursalah wa Maka>natuha fi al-Tasyri>*, ttp: Da>r al-Kutub al-Ja>mi'I, 1983.
- Rahman, Fazlur, "Gerakan Pembaharuan dalam Islam di Tengah Tantangan Dewasa ini" dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra *et al.*, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Metode dan Alternative Neomodernisme Islam*, Kumpulan tulisan disunting dan diterjemahkan oleh Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan, 1987.
- Rais, El- Heppy, *Kamus Ilmiah Polpuler*, Jakarta: Pustaka pelajar, 2012.

- Al-Raisuni, Ahmad, *Nadlariya>t al-Maqa>sid 'Ind al-Ima>m al-Sya>tibi>*, Riya>d: al-Da>r al-'A>lamiyah al-Kita>b al-Isla>my, 1995.
- Ramli, Andi M., "Gambaran Singkat tentang Pendidikan di Pesantren" dalam Buletin *Bina Pesantren*, Depag RI, Juli 1999.
- Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengtahuan Berparadigma Ganda*, Terjemah oleh Alimandan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Robson, S.O., *Principle of Indonesian Philology*, Lieden: Rijksuniversiteit te Lieden & Compliments of The Departement of Languages and Cultures of South East Asia and Oceanea, 1989.
- Al-Sakha>wi, Syamsu al-Di>n Abu> al-Khair Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Muhammad, *al-Maqa>shid al-Hasanah fi> Baya>ni Katsi>r min al-Akhba>r al-Musya>taharah 'ala al-Alsinah*, Beirut: Da>r al-Kutub al-Arabi, 1985.
- Saksono, Widji, *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah Metode Dakwah Walisongo*, Bandung: Mizan, 1996.
- Al-Salabi, Ali Muhammad, *Ta>ri>kh al-Ta'lim fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'u>diyyaal*, Kuwait: Dar-Qalam, 1987.
- Saleh, Fauzan, *Modern Trends in Islamic Theological Discourse in 20th Century: A Critical Study*, Brill, 2001.
- Saputro, Karsono H., *Percik-Percik Bahasa dan Sastra Jawa*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2005.
- Scmidt, Jan, "Pan-Islamisme di Antara Porte, Den Haag dan Buitenzorg" dalam Nico J.G. Kaptein (edt.), *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia-Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan belas dan awal Abad ke Dua puluh*, Jakarta: INIS< 2003.

- Al-Siba'I, Musthafa, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, terj. Oleh Nurcholiss Majdij, Jakarta: Pustaka Firdaus, 199.,
- \_\_\_\_\_, *Ta>ri>kh Mekah; Dira>sa>t fi al-Siya>sah wa al-'Ilm wa al-Ijtima>' wa al-Umran*, al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Suu>diyyah, Wiza>rah al-Ma'a>rif al-Maktabah al-Madrasiyyah, 1984.
- Shiddi>q, Al- Muhammad bin 'Alan, al-Sya>fi'i al-'Asy'ari al-Makki, *Dali>l al-Fa>lihi>n*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh, 1971, jilid 1.
- Shiraishi, Takashi, *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, terjemah oleh Hilmar Farid, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Siddiq, Achmad, *Khitthah Nahdliyah*, Bangil: Persatuan, 1980.
- Sjamsuddin, Helius, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Soekadri, Heru, *Kiyai Haji Hasyim Asy'ari*, Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Depdikbud, 1980.
- Soekmono R, *Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Kanisisus, 1974
- Soepanto, *Hizbullah Surakarta 1945-1950*, Surakarta: UMS Karanganyar, 1993.
- Sofwan, Ridi, dkk, *Islamisasi di Jawa, Walisongo, Penyebar Islam di Jawa, Menurut Penuturan Babad*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996.

- Sunyoto, Agus, "Ulama dalam Lintasan Sejarah Kebangsaan Indonesia" disampaikan dalam Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama Angkatan II di Rengasdengklok Karawang, 8-6 Juni 2012.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah 2, Buku yang akan Menuntaskan Kepenasaran Anda akan Kebenaran Sejarah Indonesia*, Bandung: Salamadani, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Menemukan Jejak Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Suwito dan Muhibb, "Jaringan Intelektual Kiai Pesantren di Jawa-Madura Abad XX", Penelitian Diktis DEPAG RI, 2000, 39
- Al-Sya>tibi, Abu Isha>q, *al-Muwa>faqa>t fi> Ushu>l al-Syari'a>t*, Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyah al-'A>mah li al-Kita>b, 2006.
- Syakun, Mukhlas, *Ensiklopedi Abdurrahaman Wahid, Riwayat Gus Dur*, Jakarta: PPPKI, 2013.
- Syihab, Muhammad Asad, *Hadratussyaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, perintis Kemerdekaan Indonesia*, terj. KH A. Mustofa Bisri, Yogyakarta: Titian Ilahi Press dan Kurnia Kalam Semesta, 1994.
- Tibi, Bassam, *Krisis Peradaban Islam Modern: Sebuah Kultur Praindustri dalam Era Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, terjemah oleh Yudian Wahyudi dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Tim PDP, *Tebuireng dari Masa ke Masa*, Tebuireng: Pesantren Tebuireng Press, 1978.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jilid. 9. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Tim Penyunting, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.

- Tjandrasasmita, Uka, (ed), "Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia", dalam Sartono Kartodirjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975
- Tjiptoatmodjo, Fransiscus Asisi Sutjipto. "Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai medio Abad XIX)." *Disertasi* pada Program Doktor dalam Ilmu Sastra Universitas Gadjah Mada, 1983.
- Turmudzi, Endang, *Strugglein For The Umma: Changing Leadership Roles Of Kiai in Jombang, East Java*, Michigan: University Michigan, 2006.
- Ulum, Amirul, dkk, *The Founding Fathers of Nahdlatul Oelama', Rekam Biografi 23 Tokoh Pendiri NU*, Surabaya: Bina Aswaja, 2014.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, terjemahan oleh Tim Penerjemah Depag RI, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986.
- Verkuyten, Meykel, *The Social Psychology of Ethnic Identity*, New York: Psychology Press, 2005
- VG Kiernan, dalam William Outhwaite (editor), *Eksiklopedi Pemikiran Sosial Modern*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Vlekke, Bernard H. M., *Nusantara a History of Indonesia*, The Hague, 1959.
- Wahid, Abdurrahman, "Bangsawan yang ber-NU Melalui Jalur Kelaskaran" dalam Ario Helmi, *Biografi Zainul Arifin; Berdzikir Menyiasati Angin*, Jakarta: LTN NU, 2009.
- \_\_\_\_\_, Abdurrahman, "Kiai Bisri Syansuri: Pecinta Fikih Sepanjang Hayat", *Majalah Amanah*, Jakarta 1989.
- \_\_\_\_\_, Abdurrahman, "Pesantren Sebagai Subkultur" dalam *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3S, 1995.

- Wahid, Salahuddin, “Hadratussyaikh, Komitmen Keumatan dan Kebangsaan” dalam Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Wahyudi, Yudian, *Dinamika Politik “Kembali Kepada al-Qur’an dan Sunnah” di Mesir, Maroko, dan Indonesia*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Wild, Colin, dan Peter Carey, *Gelora Api Revolusi, Sebuah Antologi Sejarah*, Jakarta: BBC seksi Indonesia dan PT. Gramedia, 1986.
- William H. Frederick dan Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- World Book Encyclopedia*, vol. 15. Chichago: Scott Fetzer Company, 2007.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- , *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci; Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya, 1984.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri, *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Zarkasyi, Imam, “Definisi dan isi Jiwa Pondok Pesantren” dalam Amir Hamzah Wiryosukarto, dkk, *KH Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, Ponorogo: Gontor Press, 1996.
- , Imam, *Pekan Perkenalan Pondok Modern Gontor*, Gontor: Darussalam Press, 2013.
- Ziemek, Manfred, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1986.
- Zubair, Maimoen, “Sambutan” dalam Amirul Ulum dkk (ed), *The Founding Fathers of Nahdlatol Oelama’*,

*Rekaman Biografi 23 Tokok Pendiri NU*, Sidoarjo: Bina Aswaja, 2014

Zuhri, Achmad Muhibbin, *Pemikiran KH M. Hasyim Asy'ari tentang Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah*, Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, 2010.

Zuhri, Saifuddin, *Berangkat Dari Pesantren*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.

\_\_\_\_\_, Saifuddin, *Mbah Wahab Hasbullah; Kiai Nasionalis Pendiri NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.

\_\_\_\_\_, *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1977

\_\_\_\_\_, *Kaleidoskop Politik di Indonesia*, Jakarta: Gunung Jati, 1983.

## **B. Arsip , Majalah, Laporan, Koran, Catatan Peristiwa**

### **1. Arsip ke-NU-an.**

Algemene Huishoudelijk Reglement N.O (Anggaran Roemah Tangga 'Oemoem N.O)

al-Masail al-Muqarrarat ing (Muktamar) Congres Nahdlatoel-'Oelama' kang kaping kalih ing Wulan Bakda Mulud Sanah 1346 (1927) (Arab pegon).

Berita Nahdlatoel-'Oelama' "Congres Nummer" Ketiga (dikeluarkan setengah boelan sekali), 15 September '37.

Berita Nahdlatoel-'Oelama', Madjallah Islamijah Tengah Boelanan Oentoek Oemoem, Druk Nahdlatoel-'Oelama' Soerabaja, 15 Juli 1939 (Bahasa Indonesia dan Arab pegon).

Half Maanblad "Berita Nahdlatoel-'Oelama'" 1 Agustus 1936, ttp: Peneleh 74 S'DAJA.

Jurnal *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 2, 1998.



- Majalah Nahdlatul Ulama *Aula*, Ishdar 11 SNH XXXVI, November 2015.
- Minal Mukhtar ilal Mukhtar, Surabaya: Tim Kerja Museum NU, tth.
- Mu'tamar NO ke VII, dalam "Soeara NO" TH III/1343 H (Arab pegon).
- Officieele-Notulen Dari Kepoatoesan Congres Nahdlatoeel-'Oelama' Jang ke XIV di Magelang (ddo. ½ sampai 6/7 Juli 1939).
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Kumpulan Masalah Diniyah dalam Mu'tamar NU ke-1 s/d 15*, Semarang: Toha Putera, 1960.
- Poatoesan Congres Nadlatoel-Oelama' KA 10 di Solo Soerakarta Moelai 13-19 April 1935, Hoofdbestuur Nahdlatoeel-Oelama' 1935 (Bahasa Indonesia dan Arab pegon).
- Poatoesan Congres Nadlatoel-Oelama' Kaping 12 1938, Koedoes: TBS, 1938 (Arab pegon)
- Poatoesan Moektamar Nahdlatoeel-Oelama' KA 16, Tanggal 23-26 Rob-achir 1365 (26/27-29 Maret 1946 di Poerwokerto), Soekaradja: Tjabang Nahdlatoeel-Oelama' Banjoemas di Soekaradja 1946.
- Statuten Perkoempoelan Nahdlatoeel-'Oelama', mendapat Rechpersoon pada 6 Februari 1930 No. IX.
- Toeroenan Permohonan Oentoek disjahkan Atas Pendirian Perkoempoelan Agama (disjahkan pada 10-9-2603 oleh Gunseikan).
- Verslag Congres Nahdlatoeel-'Oelama' Jang ke 15 di kota Soerabaia, 9/10-15 Desember 1940.
- Verslag-Congres Nahdlatoeel-'Oelama' Jang ke XIII Kota Menes Bantam 16/17 Juni '38, HBNO Alg. Zaken Tanfidziah Soerabaia, 1938.

## 2. Umum.

- Berita Oemoem, 1 dan 17 April 1942
- Buletin Bina Pesantren, Depag RI, Juli 1999
- Djawa Baroe, II, 18 Edisi Khusus Kemerdekaan (18 September 1944)
- Gema Muslimin, N0.3-4 Maret/April 1954
- Gema Muslimin, N0.3-4 Maret/April 1954
- Harian Umum Kedaulatan Rakjat, 26 Nopember 1945
- Harian Umum Kedaulatan Rakjat, 20 November 1945
- Majalah Panji Masyarakat, No. 5 tanggal 15 Agustus 1959.
- Majalah Pesantren, Jakarta: P3M, No. 2/Vol. IV/1987.
- Majalah Tebuireng, edisi 38, Mei-Juni 2015
- Oendang-oendang No. 3 tertanggal 20 Maret 1942.
- Pandji Pustaka, XX, 8 (30 Mei 1942).
- Pemandangan (Djakarta), 20 dan 16 Mei 1942.
- Peraturan Bumiputera yang bersangkutan dengan agama Islam, Weltevreden, tp, 1926.
- Soeara MIAI, I, I (1 Januari 1943)
- Soeara Moelimin Indonesia, 15 Mei 2604 (1944)
- Soeara Moelimin Indonesia, II, 3, 1 Pebruari 1944
- Soeara Moeslimin Indonesia, I, I, 1 Desember 1943.
- Soeara Moeslimin Indonesia, No. 13 Tahun II, 1 Juli 2604 (1944)
- Soeara Moeslimin Indonesia, No. 16, 15 Agustus '04 (1944)
- Studia Islamika, Vol. 22, No. 1, 2015
- Warta Besoeki-Shuu, Rebo Pahing, 27 September 2604 (1944).

### **C. Media Sosial/Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Nusantara1942-1945](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara1942-1945)

(diakses tanggal 10 Desember 2013).

[http://conundrumism.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-task-](http://conundrumism.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-task-mengolah-informasi-tentang.html)

[mengolah-informasi-tentang.html](http://conundrumism.blogspot.co.id/2015/01/sejarah-task-mengolah-informasi-tentang.html). (diakses pada 18 September 2016).

<http://indonesian->

[persons.blogspot.co.id/2014/02/berkembangnya-taktik-moderat-kooperatif\\_10.html](http://indonesian-persons.blogspot.co.id/2014/02/berkembangnya-taktik-moderat-kooperatif_10.html). (diakses pada 23 Pebruari 2017).

<http://kampusbebeck.blogspot.co.id/2010/03/bebeck-berpolitik-sangat-pasif.html>.

<http://kbbi.web.id/cantrik>. (diakses pada tanggal 10 Juni 2016)

<http://www.recma.org/sites/default/files/pdf>. (diakses pada 12 Januari 1917).

<http://pesantren.tebui reng.net/index>. (diakses pada 12 Januari 2016).

[islambanjar.blogspot.com/2012/05/pola-dakwah-muhammadiyah-dan-nu.html](http://islambanjar.blogspot.com/2012/05/pola-dakwah-muhammadiyah-dan-nu.html) (diakses pada 3 Maret 2018)

Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist.

Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. kbbi.web.id.

Program Hadits *Jawami 'u al-Kalim*.

#### **D. Wawancara**

Wawancara dan dialog dengan Bapak Abu Bakar, ayah penulis (lahir tahun 1934, alumni Pondok Pesantren Tebui reng), di Bandung Diwek Jombang pada tanggal 05 Januari 2010.

Wawancara dengan Dr. KH. Makinuddin, M.Ag., pada tanggal 15 Juni 2016 di Jombang. Ia adalah salah satu dari kiai yang mengajar kitab *kuning* di Pondok Pesantren Tebui reng Jombang.

Wawancara dengan Gus Zaki, cucu KH Hasyim Asy'ari, di Pondok Pesantren al-Masturiyah Tebuireng Jombang, pada 8 Oktober 2016.

Wawancara dengan Habib Ghofier, Lurah Desa Karanglo Kecamatan Mojowarno pada tanggal 23 Juni 2016 di Mojowarno.

Wawancara dengan KH Muhid Muzadi pada 22 Oktober 2012 di Gedung PCNU (eks. Gedung HBNO) jalan Bubutan VI Surabaya.

Wawancara dengan KH. Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang di Tebuireng pada 29 Agustus 2016.





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. KH Hasyim Asyari (Koleksi Gus Zaki Tebuireng Jombang)



### 2. Cikal Bakal Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

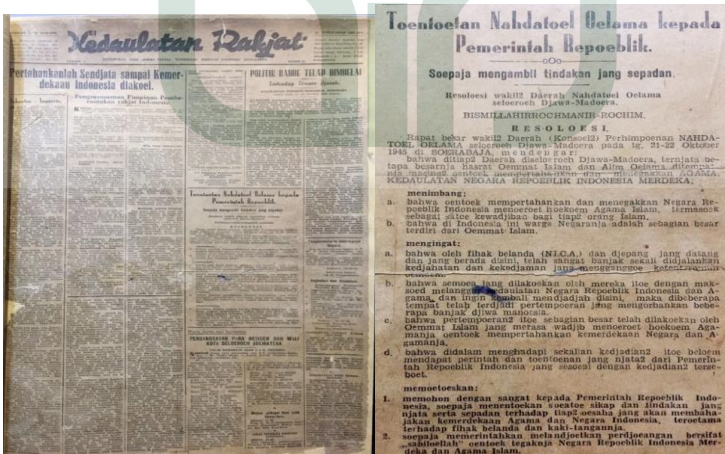


sumber :<http://www.tebuireng.org/>

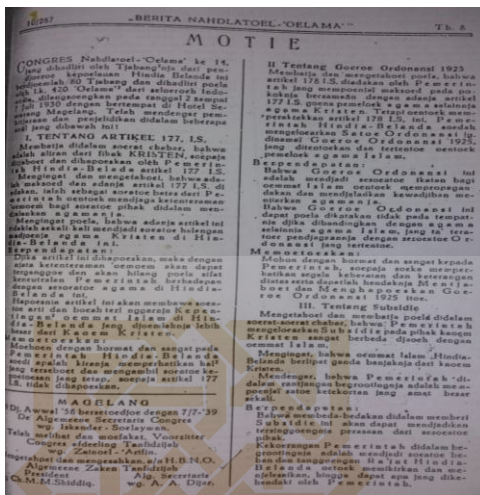
### 3. Warta Besoeiki Shuu (Bagian Basa Madoera), terbit pada 24 September 2604 (1944)



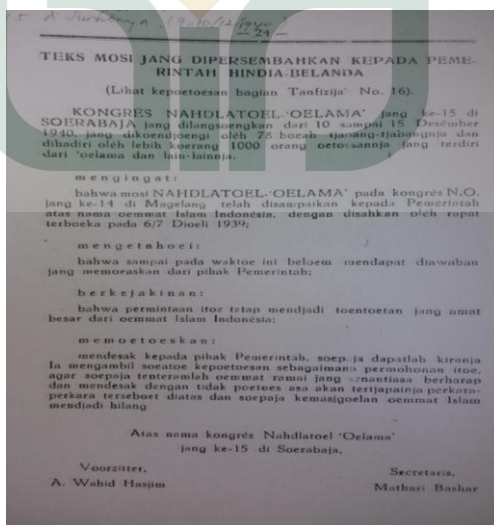
### 4. Harian Kedaulatan Rakjat, Resolusi Jihad PBNU Oktober 1945 dimuat pada tanggal 26 Oktober 1945 (Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta)



5. Mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda Hasil Keputusan Mukhtar NU ke-14 di Magelang 1939 M. ("Berita Nahdlatol 'Oelama' ", koleksi PBNU)



6. Mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda Hasil Keputusan Mukhtar NU ke-15 di Surabaya 1940 M. ("Berita Nahdlatul 'Oelama' ", koleksi PBNU)





## 7. Permohonan Izin Pengesahan Organisasi NU Kepada Pemerintahan Balatentara Jepang tahun 1943. (Koleksi KH Sholeh Hayat Bangil Pasuruan)

1945

**TOEROENAN**  
PERMOHONAN OENTOEK DISJAHKAN  
ATAS PENDIRIAN PERKOEKPOELAN AGAMA.

*Dia serah*  
Kepala Paderes Kandang Toman  
Kepala Pemerintah Balatentara Dai Nippon  
di Djakarta.

**DJAKARTA.**

Dengan segala hormat!

Dengan surat ini kami mohon kemurahan hati Paderes Kandang Toman untuk diberi izin untuk mendirikan Perkoeempolan agama dengan nama N.H.H. DLAYOEL OELAMA, selagimana tersebut dibawah ini. Maka terane surat permohonan ini diberikan semene surat-surat yang terdapat

Wakil paderes "Nahdlatul-Ulema"  
Kiai Haji Abdulwahab Chasbullah

Tanggal 14 bulan 6 tahun 2003.

1. Perkoempolan ini bernama "Nahdlatul-Ulema"
2. Ketua Besar dari perkoeempolan ini bernama di Sedyatun
3. Sesama dengan perkoeempolan ini untuk perkoeempolan yang selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
4. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
5. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
6. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
7. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
8. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
9. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
10. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
11. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
12. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
13. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
14. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
15. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
16. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
17. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
18. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
19. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
20. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
21. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
22. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
23. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
24. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.
25. Semua perkoeempolan ini akan selaras dengan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum di Dai Nippon dan pemerintah yang di pertahankan oleh Toman Arai Toman.

Disajikan pada 10-9-2003 oleh GUNSEIKAN.

Peng N Q.3



10. Cover Putusan Kongres NU ke 10 di Surakarta 1935 dan Berita NU yang berisi berita tentang Kongres NU di Banjarmasin tahun 1936 (Koleksi PBNU)





12. *Staatsblad van Nederlandsch-Inde*; Laporan Bantuan Keuangan Pemerintah Belanda Kepada Agama Katolik, Protestan, dan Islam tahun 1938 (Koleksi ANRI Jakarta)

STAATSBLAD			
VAN			
NEDERLANDSCH-INDIË			
1938 No. 511 REGROOTING 1938. AFDEELING V. Spitting in artikelen en sub-artikelen van de posten van Hoofdstuk II.			
Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 5 September 1938 No. 5.			
Gelet op artikel 2 van de Indische Comptabiliteitswet 1925, zoals dit artikel luidt ingevolge de wet van 29 December 1932 (Nederlandsch Staatsblad No. 666, Indisch Staatsblad 1933 No. 8) en op het bij de wet van 23 Mei 1938 (Nederlandsch Staatsblad No. 3928, Indisch Staatsblad No. 297) goedgekeurd besluit van 6 September 1937 No. 5 (Staatsblad 1938 No. 324);			
Is goedgevonden en verstaan:			
Eenig artikel.			
De posten van het tweede hoofdstuk van Afdeling V (Departement van Onderwijs en Eeredienst) der begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1938, zoals die posten luiden ingevolge het bij de wet van 23 Mei 1938 (Nederlandsch Staatsblad No. 3928, Indisch Staatsblad No. 297) goedgekeurd besluit van 6 September 1937 No. 5 (Staatsblad 1938 No. 324), werden in artikelen en sub- artikelen gesplitst als volgt:			
AFDEELING V. DEPARTEMENT VAN ONDERWIJS EN EERDIENST.			
Post 5.1 Departement en algemeene uitgaven.			
Departement.			
Artikel	5.1.1	Personnele uitgaven.	
Sub-art.	5.1.1.1	Besoldigingen en bijzondere toelagen .....	559 000
28 1938, No. 511			
Materiele uitgaven.			
Sub-art.	5.36.1.5	Opleidingskosten .....	900
Sub-art.	5.36.1.6	Kopen voor de gemeenschappelijke behoefting van de bewoelingen voor het Inlandsch bestuur .....	300
Sub-art.	5.36.1.7	Kantoorkosten voor het Protestantisch Kerk- bestuur .....	800
Sub-art.	5.36.1.8	Nederlandsche Regeringstelselgrammen .....	60 000
Sub-art.	5.36.1.9	Huis- en verhuiskosten .....	62 900
Totaal artikel 5.36.1			696 100
Artikel	5.36.2	Roomsche-Katholieke Eeredienst.	
Personnele uitgaven.			
Sub-art.	5.36.2.1	Besoldigingen en bijzondere toelagen .....	222 000
Sub-art.	5.36.2.1A	Duurstekingen .....	Memorie
Sub-art.	5.36.2.2	Staatshuizen en kindertoeleg .....	300
Sub-art.	5.36.2.3	Duurstekingen .....	1 800
Sub-art.	5.36.2.4	Verdere personele uitgaven .....	6 000
Totaal artikel 5.36.2			241 100
Materiele uitgaven.			
Sub-art.	5.36.2.5	Opleidingskosten .....	100
Sub-art.	5.36.2.6	Nederlandsche Regeringstelselgrammen .....	300
Sub-art.	5.36.2.7	Huis- en verhuiskosten .....	55 000
Totaal artikel 5.36.2			35 300
Islam.			
Personnele uitgaven.			
Sub-art.	5.36.3.1	Personnele en andere toelagen .....	5 200
Totaal artikel 5.36.3			5 200
Materiele uitgaven.			
Sub-art.	5.36.3.2	Diverse uitgaven .....	2 300
Totaal artikel 5.36.3			2 300
Totaal post 5.36			7 500
waarvan: personele uitgaven .....			1 000 000
materiele uitgaven .....			279 500
			180 600

No. 511, 1938		27		
		Post 535	Wetenschappen en Kunsten, uit- gezonderd natuurwet- schappen.	
Artikel	5.35.1	Wetenschappelijk taakmatig onderzoek.		
		Personeels uitgaven.		
Sub-art.	5.35.1.1	Beoordelingen en bijzondere toelagen .....	Memorie	28 275
	5.35.1.1.A	Daurtoelagen .....		125
	5.35.1.2	Kindertoelagen .....		2 200
	5.35.1.3	Verdere personeels uitgaven .....		30
		Materiele uitgaven.		
Sub-art.	5.35.1.4	Kantoorkosten .....	Memorie	2 000
	5.35.1.5	Buizenhooische Reageringselogrammen .....	Memorie	
	5.35.1.6	Bele- en verblijfskosten .....		2
		Totaal artikel 5.35.1		33
Artikel	5.35.2	Instellingen van Wetenschap en Kunst (bijdragen).		
Sub-art.	5.35.2.1	Bijdragen aan het Nederlandsch Bijbel- genootschap .....		15 000
	5.35.2.2	Bijdragen aan het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Wetenschappen en Kun- sten .....		58 700
	5.35.2.3	Bijdragen aan de Vereeniging „Het Java- Instituut“ .....		4 585
	5.35.2.4	Andere bijdragen voor Wetenschap en Kunst voor zoover niet elders omschreven ..		4 475
		Totaal artikel 5.35.2		82
		Totaal post 535 .....		115
		waarvan: personeels uitgaven .....		30
		materiele uitgaven .....		52
		bijdragen .....		33
		Post 536		
		Veredienst		
Artikel	5.36.1	Protestantische Eredienst.		
		Personeels uitgaven.		
Sub-art.	5.36.1.1	Beoordelingen en bijzondere toelagen .....	Memorie	558 000
	5.36.1.2	Daurtoelagen .....		15 900
	5.36.1.3	Standplaats- en kindertoelagen .....		7 000
	5.36.1.4	Verdere personeels uitgaven .....		12 300
				688





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri :

Nama : Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.  
Tempat/tgl lahir : Jombang, 6 Agustus 1968  
NIP : 196808062000031003  
Pangkat/Gol. Ruang : Lektor (III/d)  
Alamat Rumah : Simo RT. 13/04 Kesambi Porong,  
Sidoarjo, Jawa Timur  
Alamat Kantor : Jl. A. Yani 117 Surabaya  
Email : imamibnuhajar gmail.com  
No Telp. : 08123 606 456  
Nama Ayah : H. Abu Bakar (*alm*)  
Nama Ibu : Siti Zaenab (*almh*)  
Nama Istri : Hj. Denik Mahsaniyah, S.Ag., S.Pd.  
Nama Anak : 1. M. Hisyam Hawari (PM Gontor  
Ponorogo)  
2. M. Syiham Rabbani (Ponpes al-  
Munawwariyah Bululawang  
Malang)  
3. Nooria Aqeela Parameswari (MI  
Sunan Ampel Kesambi Porong  
Sidoarjo)

### B. Riwayat Pendidikan :

#### 1. Pendidikan Formal

- a. MI : Gebangmalang Bandung Diwek Jombang 1974-1980
- b. SDN : Bandung Diwek Jombang 1978-1979
- c. MTs : Tebuireng Jombang 1981-1982
- d. KMI : Pondok Pesantren Pabelan Magelang 1982-1983
- e. KMI : PM Gontor Ponorogo 1983-1987
- f. S1 : STAI Darunnajah Jakarta 1989-1995
- g. S2 : IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1997-1999
- h. S3 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009 - sekarang



## **2. Pendidikan Non-Formal**

- a. Pendidikan Calon Dosen se-Indonesia Kemenag RI di Jakarta 1999-2000.
- b. Peningkatan Bahasa Arab di Canal Sues University Mesir 2012

## **C. Riwayat Pekerjaan :**

1. Guru Tsanawiyah di Ponpes Darunnajah Jakarta 1987 - 1992
2. Guru Aliyah di Ponpes Darunnajah Jakarta 1992 - 2008
3. Asisten Dosen pada STAI Darunnajah Jakarta 1998 - 2008
4. Dosen DPK pada STAI Darunnajah Jakarta 2000 - 2008
5. Dosen pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2003 - 2008
6. Dosen pada UIN Sunan Ampel Surabaya 2008 – sekarang


## **D. Karya Ilmiah :**

1. Sukseasi Dalam Islam; Telaah Historis Pergantian Kepemimpinan masa Khulafa' al-Rasyidin (Tesis, 1999)
2. Menelusuri Kebesaran Kerajaan Islam Banten dalam Data Tekstual dan Artefaktual (Jurnal Kordinat Kopertais Wilayah I Jakarta, 2006).
3. Islam Politik di Era Orde Lama dan Baru; Telaah atas Aksi dan Reaksi Tokoh-tokoh Islam (Jurnal Al'Adalah STAIN Jember, 2007)
4. Islam Politik Masa Orde Baru (Jurnal Interest STAIN Jember, 2007).
5. Inkar Sunnah; Asal-usul dan Tokoh-tokohnya (Jurnal Emperisma STAIN Kediri, 2008).
6. Inkar Sunnah; Argumentasi dan Bantahan (Jurnal Al-Hikmah, Jurusan Da'wah STAIN Jember, 2009).
7. Eksklusivisme Sosial-Politik Para Pemimpin Islam (Jurnal STAI\_DN, Kependidikan dan Hukum, 2010).
8. Reoreintasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan (Jurnal al-Manahij IAIN Purwokerto, 2010)

9. Evolusi Agama; Melihat Perkembangan Agama melalui Tinjauan Sejarah (Jurnal An Nufus, Jurnal Sosial, Pemikiran, dan Keagamaan, 2013)
10. Menulis Ulang (Kembali) Sejarah Usman bin Affan (Studi Historis Analisis Terhadap Mispersepsi Penulisan Sejarah Usman bin Affan dalam Sejarah Islam (DIPA IAIN Sunan Ampel, 2013)
11. Sejarah Agama-agama; Dari Sederhana menuju Sempurna (Jurnal al-Tsaqafah ISID, 2014).
12. Sikap Kooperatif dan Non-kooperatif KH Hasyim Asy'ari terhadap Penjajah Belanda dan Jepang 1905-1947 (Disertasi pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Yogyakarta, April 2019

Yang membuat,



Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.

